

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**MENGATASI KEMISKINAN DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MYANMAR**

**Oleh :
THAN HTIKE
KOLONEL (MYANMAR)**

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXI
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan makalah Taskap ini dengan judul: “MENGATASI KEMISKINAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MYANMAR”.

TASKAP ini adalah salah satu persyaratan akademis bagi Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Tahun 2020 di Lemhannas RI. Berkat dorongan, perhatian dan kesabaran dari Tutor Taskap Bapak MarsdaTNI (Purn) Surya Dharma,S.IP, serta masukan dari rekan-rekan peserta PPRA LXI, TASKAP ini dapat diselesaikan kurang- lebih tepat pada waktunya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu.

Saya sangat menyadari bahwa TASKAP ini masih belum sempurna, lagipula dirumuskan dalam jangka waktu yang terbatas oleh seorang peserta mancanegara, dan masih banyak hal yang memerlukan perbaikan untuk penyempurnaan. Oleh karena itu koreksi serta saran-saran konstruktif dari semua pihak akan selalu saya terima dengan sangat senang hati.

Menyadari kekurangan-kekurangan tersebut, maka harapan besar saya adalah TASKAP ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkan.

Jakarta, September 2020

Penulis

THAN HTIKE

KOLONEL (MYANMAR) NO:083

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Than Htike

Pangkat : Kolonel

Jabatan : Instruktur Kepala

Instansi : Angkatan Darat

Alamat : No. 11 Depot Pelatihan Tingkat Lanjut Militer Myanmar

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)/Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPRA) ke LXI tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. **Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.**
- b. **Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.**

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, September 2020

PENULIS



THAN HTIKE

KOLONEL (MYANMAR) NO: 083

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah	8
3. Maksud Dan Tujuan.....	9
4. Ruang Lingkup Dan Sistematika.....	10
5. Metode Dan Pendekatan.....	10
6. Pengertian-Pengertian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
7. Umum.....	12
8. Landasan Nasional.....	12
9. Peraturan Dan Perundang Undangan Terkait.....	13
10. Landasan Teori	14
11. Data Dan Fakta	17
12. PerkembanganLingkungan Strategis.....	19
BAB III PEMBAHASAN.....	28
13. Umum.....	28
14. Masalah Utama Penyebab Kemiskinan di Myanmar.....	25
15. Kondisi Sosial Ekonomi Di Myanmar Pada Masa Demokrasi	34
16. Strategi Pengurangan Kemiskinan Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Ekonomi Myanmar	36
17. Upaya Pengentasan Kemiskinan di Myanmar	47
18. Strategi untuk Mengurangi Ketimpangan Pendapatan diMyanmar.....	50

19. Pengurangan Pengangguran di Myanmar	53
20. Hasil Analisis	55
BAB IV PENUTUP	58
21. Simpulan	58
22. Rekomendasi.....	61

ALUR PIKIR

DAFTAR TABEL

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Republik Persatuan Myanmar adalah satu diantara negara di Asia Tenggara sebagai anggota ASEAN, panjangnya dari utara ke selatan lebih dari 2.000 kilometer. Negara ini memiliki luas total 676.577 kilometer persegi (261.228 mil persegi). Negara ini berbatasan dengan Cina, Laos, Thailand, India, dan Bangladesh sepanjang 5.585 kilometer, dan wilayah pantainya sepanjang 2.800 kilometer. Myanmar dua kali ukuran Vietnam dan 1,25 kali lebih besar dari Thailand.¹

Tiga jajaran gunung yang tercakup dalam hutan membentang dari utara ke selatan adalah Rakhine Yoma, Bago Yoma dan dataran tinggi Shan. Tiga sungai utama di negara itu yaitu Ayeyawady, Sittoung dan Thanlwin berasal dari tiga jajaran gunung. Sebagian besar lahan pertanian subur terletak di antara pegunungan, dan wilayah delta Ayeyawady dengan panjang 240 kilometer dan lebar 210 kilometer.

Myanmar umumnya merupakan sebuah negara yang berbasis agro (pertanian), sebagai negara agraris, negara ini sepenuhnya bergantung pada hujan untuk pertaniannya. karenanya perubahan signifikan dalam perekonomian negara dapat terjadi akibat adanya perubahan iklim yang berdampak terhadap sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian negara sebesar 40 persen dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menyerap 65 persen dari total tenaga kerja nasional. Selain itu, hampir dua pertiga dari sektor manufaktur negara tersebut berasal dari pertanian dan ekspor utama adalah produk dari sektor pertanian.

Menurut sensus 2020, Myanmar memiliki populasi 54.409.800. Sekitar 135 etnis minoritas telah menetap di tujuh wilayah dan tujuh negara bagian. Bamar adalah kelompok etnis dominan dengan populasi terbesar di Myanmar dan Shan,

¹Myat Thein Myanmar Economic Development Analysis; 2015 September 1-3

Kachin, Chin, Kayin, Kayah, Mon, Rakhine, dan etnis minoritas lainnya yang memiliki porsi signifikan dari populasi negara itu.

Antara periode akhir 1930 hingga awal 1940 sebelum Perang Dunia II, Myanmar adalah negara dengan ekonomi terdepan di wilayah tersebut serta pengeksport beras terbesar di dunia. Perang Dunia II adalah pukulan telak bagi perekonomian negara dan infrastruktur negara dihancurkan oleh kebijakan agraria kolonial Inggris dan Jepang. Selain itu, penutupan rute ekspor di masa perang mengganggu lebih dari setengah tanah pertanian negara itu, dan produksi beras negara mencapai titik terendah sejak petani meninggalkan lahan pertanian mereka. Myanmar memperoleh kemerdekaannya pada Januari 1948, namun negara terus dirongrong oleh pemberontakan pasukan bersenjata etnis di seluruh negeri sebagai warisan kejahatan kolonial Inggris melalui kebijakan yang memecah belah.

Myanmar memiliki prospek pembangunan di banyak bidang, dengan jumlah populasi penduduk usia muda yang cukup besar dan kaya lahan pertanian, mineral, hidrokarbon, hutan dan sumber daya alam termasuk sumber daya air. Secara geografis, Myanmar mungkin akan menjadi pusat perdagangan regional karena secara strategis terletak di antara kedua negara berkembang, Republik Rakyat Tiongkok dan India, berbagi perbatasan dengan kedua negara tersebut dengan panjang garis pantai 1.370 mil. Selain itu, Myanmar dianggap sebagai lokasi yang strategis di One Belt One Road (OBOR) China dan Strategi Indo-Pasifik AS yang tampaknya mengandung potensi kemajuan ekonomi masa depan.

Sejak mendapatkan kemerdekaan, Myanmar telah mengalami berbagai sistem politik dan administrasi pemerintahan, sebagai berikut:

- a. Demokrasi Parlementer (1948-1962).
- b. Partai Program Sosialis Burma (1962-1988).
- c. Pemerintah Tatmadaw (1988-2011).
- d. Republik Persatuan Pemerintah Myanmar (Era Demokrasi) dari 2011 hingga saat ini, secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1) **Demokrasi Parlementer (1948-1962):**² Banyak Pakar melihat bahwa Myanmar mengalami dua situasi mengerikan di mana kepemilikan tanah pertanian dialihkan dari petani asli kepada rakyat India selama periode 1826 hingga 1947 di bawah kekuasaan kolonialisme dan perdagangan bebas diterapkan di negara itu. Kecuali beberapa monopoli pada perdagangan luar negeri negara itu. Sistem ekonomi Laissez-faire dan sistem yang memungkinkan level playing field adalah kebijakan ekonomi yang diadopsi oleh pemerintah Inggris. Jadi, sistem ekonomi Myanmar pada periode pasca-kolonial menjadi tidak merata karena sistemnya didasarkan pada pendapatan beras. Perusahaan asing dapat menghasilkan keuntungan besar tetapi sistem mengubah kehidupan petani padi Myanmar menjadi petani tidak memiliki tanah, membuat mereka tertinggal dari praktik pertanian modern.

Myanmar pascakemerdekaan meluncurkan rencana pembangunan ekonomi dua tahun yang sebenarnya berakhir setelah lebih dari 12 tahun. Pemberontakan nasional terjadi sejak awal pertengahan tahun kedua, dan pemerintah hanya berfokus pada supremasi hukum. Selanjutnya, Rencana Pyidawtha yang diimplementasikan antara periode 1950/1951 hingga 1959/1960 dengan tujuan mencapai nilai ganda dalam PDB pada tahun 1959/1960, namun berakhir pada tahun 1955. Kemudian, rencana pembangunan ekonomi empat tahun diimplementasikan. Meskipun negara ini memiliki kemajuan luar biasa di wilayah Asia dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 3,0 persen, standar hidup para petani dan pegawai negeri yang hidup dengan pendapatan tetap menjadi lebih buruk karena distribusi

²[https://www.researchgate.net/publication/341567260 Politics of Myanmar Experiment with Democracy 1948-1962](https://www.researchgate.net/publication/341567260_Politics_of_Myanmar_Experiment_with_Democracy_1948-1962)

pembangunan yang tidak merata kepada seluruh rakyat pada saat itu sebagai akibat dari meningkatnya standar kebutuhan hidup.

2) **Partai Program Sosialis Burma (1962-1988):**³Reformasi di sektor pertanian dan perluasan sektor ekonomi milik negara dilakukan selama periode 1962 hingga 1988. Pemerintah menjalankan sistem ekonomi sosialis dan ekonomi negara serta kemampuan berbagai sektor menurun. Tingkat pertumbuhan PDB negara itu turun menjadi 2,2 persen dan proporsi investasi dan tabungan turun menjadi 10,9 dan 8,7 persen pada 1966 hingga 1969 dari 13,5 dan 15,4 persen pada periode 1962 hingga 1965. Jadi, tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata negara itu 1,4 persen per tahun pada saat Partai Program Sosialis Burma berkuasa. Menurut statistik pada tahun 1988, 61 persen keluarga pedesaan bekerja di lahan pertanian yang memiliki luas total kurang dari lima hektar di sektor pertanian, yang mengarah pada kesimpulan bahwa tidak ada kemajuan signifikan yang terlihat pada akhir tahun 1988. Pada tahun 1987, negara tersebut melamar dan menerima status *Less Developed Country* (LDC) pada tahun 1987. Meskipun tidak ada pengentasan kemiskinan dan kegiatan pembangunan pedesaan sebelum 1988, Myanmar memiliki cukup banyak keberhasilan dalam meluncurkan kampanye untuk mempromosikan literasi di daerah pedesaan.

3) **Pemerintah Tatmadaw (1988-2011):**⁴Tatmadaw merebut kekuasaan pada bulan September 1988. Mengesahkan undang-undang investasi asing dan menghapus pembatasan pada sektor swasta dalam perdagangan lokal dan asing, pemerintah Tatmadaw memprakarsai

³<https://www.burmalibrary.org/en/category/military-bspp-period-1962-1988>

⁴<https://www.britannica.com/place/Myanmar/Myanmar-since-1988>

ekonomi yang berorientasi pasar pada tahun 1989. Reformasi dalam ekonomi makro adalah sebagai berikut :

- a) Diundangkannya UU Penanaman Modal Asing.
- b) Pelaksanaan reformasi sektor keuangan.
- c) Implementasi reformasi sektor ekonomi.
- d) Implementasi reformasi di sektor pariwisata.
- e) Melaksanakan pengembangan wilayah perbatasan dan memastikan transportasi yang lancar dan aman.

Meskipun melihat kemajuan dalam sektor ekonomi dasar, sektor industri dan manufaktur dan sektor jasa, produksi sektor industri dan manufaktur dan investasi asing langsung menurun karena sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara barat. Proporsi sektor pertanian dan sektor industri dan manufaktur Myanmar selama periode dari 1988 hingga 2011 ditunjukkan pada (Table -1)

Di sektor perdagangan, Myanmar hanya memiliki hubungan perdagangan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara Asia Tenggara dan telah terjadi penurunan perdagangan dengan sebagian besar negara-negara barat. Ekspor utama Myanmar adalah kayu jati dan kayu keras, beras dan kacang-kacangan pada waktu itu. Proporsi ekspor utama Myanmar ditunjukkan pada (Tabel -2)

Berkat rencana lima tahun pada masa pemerintahan Tatmadaw, negara ini mencapai pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan PDB. Tetapi bagian terbesar dari ekspor negara itu adalah gas alam yang merupakan salah satu sumber daya alam, dan kemajuan yang lemah terlihat di sektor manufaktur negara itu. Selain itu, sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat yang dipimpin AS mengakibatkan pengangguran dan

penurunan investasi asing langsung. Dalam mempelajari pangsa berbagai sektor ekonomi dan ekspor utama dalam PDB, sektor pertanian dan sumber daya alam terdiri dari PDB. Meskipun melihat kemajuan dalam indeks pembangunan manusia di Myanmar, kemajuan *Human Development Index* (HDI) lambat. HDI Myanmar ditunjukkan pada (Tabel -3).

Reformasi sektor industri diperkenalkan untuk membangun infrastruktur ekonomi pada masa pemerintahan Tatmadaw. Khususnya, diberlakukannya undang-undang untuk pengembangan sektor industri, pendirian usaha kecil dan menengah, pelonggaran pembatasan untuk mendorong lebih banyak investasi di sektor swasta dan dukungan serta dorongan untuk pengembangan industri rumahan dilakukan.

Meskipun Myanmar memiliki populasi kerja 29,1 juta pada 1991-2000, tidak ada pemanfaatan tenaga kerja yang efektif karena sanksi internasional dan jumlah sekolah pelatihan kejuruan menurun. Pada tahun 1997, Bank Dunia mengatakan bahwa 21,9 persen atau 10,6 juta penduduk negara itu hidup dalam tingkat kesejahteraan dasar minimum dan lebih banyak rumah tangga petani dan petani tak bertanah di daerah pedesaan yang tenggelam dalam kemiskinan. Berkat upaya pemerintah Tatmadaw yang dibuat untuk mengembangkan sektor pertanian, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan berkurang sampai batas tertentu, tetapi kesalahan dan kelemahan terjadi dalam menggabungkan pengembangan sektor pertanian dengan industri pedesaan berbasis tenaga kerja.

4) Republik Uni Myanmar (Era Demokrasi) dari 2011 hingga saat ini⁵. Pemerintah baru yang dipilih secara demokratis pada tahun 2011

⁵https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9011C940767B08C0852577BD0061AF7B-Full_Report.pdf

menerapkan ekonomi pasar negara melalui sistem administrasi yang demokratis. Banyak kemajuan terlihat dalam perdagangan, investasi asing dan sektor keuangan setelah implementasi reformasi menyeluruh di sektor ekonomi masing-masing negara setelah 2011. Dalam melaksanakan reformasi politik dan ekonomi dengan momentum, skema pengentasan kemiskinan dimasukkan. Setelah mencabut sebagian besar sanksi ekonomi terhadap Myanmar yang diberlakukan oleh negara-negara barat selama sekitar dua dekade, reformasi ekonomi Myanmar menjadi semakin aktif.

Menurut analisis, ditemukan bahwa 3,7 persen dari total populasi negara itu menghadapi pengangguran dan 26 persen populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Skema pengentasan kemiskinan termasuk program pembangunan pedesaan telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan dukungan pemerintah dan organisasi lokal dan internasional.

Ringkasan Status Sosial-Ekonomi. Menurut data kependudukan Myanmar dan Sensus Rumah Tangga 2020, Republik Persatuan Myanmar memiliki populasi 54,409,juta dengan tingkat pertumbuhan 0,9 penduduk. Tingkat kelahiran adalah 17,8 per 1.000 orang sedangkan angka kematian adalah 8,1. Tiga puluh persen dari total populasi tinggal di daerah perkotaan dan populasi usia kerja Myanmar adalah 34,43 juta. Secara sektoral, 42,43 persen dari total angkatan kerja dipekerjakan di sektor pertanian, 16,5 persen di sektor industri, dan 23 persen di sektor jasa.

Lebih dari setengah dari total populasi bekerja di sektor pertanian di daerah pedesaan. Bisnis utama Myanmar adalah pertanian, sektor pertanian berbagi 37,8 persen dalam PDB dan 30 persen dalam nilai total ekspor. Dari angkatan kerja yang terlibat dalam sektor manufaktur negara itu, sektor pertanian menyediakan lapangan kerja hingga 61,3 persen secara langsung atau tidak langsung, sementara 10,7 persen

bekerja di sektor manufaktur, 9,6 persen di sektor perdagangan dan perdagangan, dan 18,4 persen di sektor lainnya. Mereka yang menjalankan bisnis sendiri mewakili 36,4 persen dari angkatan kerja di daerah pedesaan sementara 18,7 persen dipekerjakan di bisnis keluarga dan 18,6 persen mendapatkan pekerjaan sambilan. Di daerah perkotaan, 34,9 persen dari total tenaga kerja adalah pengusaha, sementara 32,3 persen bekerja di bisnis sendiri dan sisanya di bisnis keluarga. Myanmar sekarang mengundang investasi asing langsung, yang memungkinkan lebih banyak partisipasi sektor swasta di sektor ekonomi dan meningkatkan lebih banyak kerja sama dengan komunitas internasional. Pada tahun 2020, tingkat pertumbuhan PDB riil negara itu mencapai 6,0 persen, menerima US \$ 65,99 miliar.

2. Perumusan Masalah.

Populasi di Myanmar yang hidup dalam kemiskinan telah berkurang setengahnya dari 48,2 persen pada 2005 menjadi 24,8 persen pada 2017. Ini adalah temuan utama dari Laporan Kemiskinan baru yang diluncurkan hari ini oleh Organisasi Statistik Pusat (CSO), dengan dukungan teknis dari UNDP dan Bank Dunia. Laporan ini adalah yang kedua dari serangkaian 3 laporan yang dihasilkan berdasarkan Survei Kondisi Hidup Myanmar.

Laporan Kemiskinan memberikan perkiraan terbaru kemiskinan di Myanmar, dengan fokus pada perbedaan spasial. Laporan tersebut menggambarkan bahwa kemiskinan pada 2017 sangat berkorelasi dengan tempat tinggalnya penduduk pedesaan di Myanmar 2,7 kali lebih mungkin menjadi miskin daripada penduduk perkotaan. Kemiskinan adalah yang paling umum di Negara Bagian Chin, di mana hampir enam dari sepuluh adalah orang miskin, dan di negara bagian Rakhine, di mana sekitar empat dari sepuluh adalah orang miskin.

Kurang dari seperempat total pendapatan di Myanmar dapat dikaitkan dengan 40 persen populasi termiskin, menunjukkan bahwa pendapatan didistribusikan secara tidak merata ke seluruh distribusi kesejahteraan dan ketidaksetaraan adalah masalah yang signifikan. 40 persen terbawah hanya

memiliki 22,1 persen pendapatan di Myanmar. Penghasilan tahunan rata-rata Myanmar per kapita adalah US \$ 1.140 (S \$ 1.516) dan sekitar 37 persen dari 54 juta orang di negara itu tinggal di dekat atau di bawah garis kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Myanmar meningkat menjadi 1,58% pada Desember 2019, dari angka yang sebelumnya dilaporkan 1,49% pada Desember 2018. Tingkat Pengangguran Myanmar diperbarui setiap tahun, tersedia dari Desember 1991 hingga Desember 2019, dengan tingkat rata-rata 0,79%. Data mencapai tertinggi sepanjang masa 1,58% pada Desember 2019 dan rekor terendah 0,69% pada Desember 2008. Data ini dilaporkan oleh Bank Dunia. Dalam laporan terbaru, populasi Myanmar diprediksi mencapai 54,41 juta orang pada Desember 2020. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja negara itu meningkat menjadi 73,24% pada Desember 1990. Dengan demikian terlihat jelas bahwa kemiskinan di Myanmar merupakan sebuah persoalan besar yang harus di cari solusinya, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah **Bagaimana mengatasi kemiskinan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Myanmar ?**

Pertanyaan Selanjutnya adalah:

- a. Apa persoalan mendasar yang menyebabkan kemiskinan di Myanmar ?
- b. Bagaimana perkembangan kondisi sosial ekonomi Myanmar pada era demokrasi ?
- c. Bagaimana konsep pengentasan kemiskinan di implementasikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi Myanmar?

3. **Maksud Dan Tujuan**

- a. **Maksud.** Maksud dari penulisan kertas karya perorangan (Taskap) ini adalah untuk memberikan gagasan pemikiran dan gambaran tentang percepatan pengentasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi myanmar.
- b. **Tujuan.** Tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan masukan kepada Lembaga Ketahanan Nasional RI dan para pembaca serta pihak-

pihak yang berkepentingan agar dapat memahami serta dapat mengambil manfaat dari karya tulis ini yang terkait dengan negara Myanmar.

4. Ruang Lingkup Dan Sistematika

- a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup tulisan ini dibatasi pada aspek kemiskinan di Myanmar dan pengentasannya serta implikasi dari kebijakannya secara makro yang diharapkan dapat memberi manfaat pada masyarakat secara merata dalam rangka ketahanan nasional Myanmar.
- b. **Sistematika.** Sistematika penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :
 - 1) **BAB I Pendahuluan.** Membahas tentang dampak kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran pada latar belakang Myanmar dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada beberapa sistem pemerintahan dan warna politik sejak awal kemerdekaan.
 - 2) **BAB II Tinjauan Pustaka.** Membahas tentang Peraturan yang mendasari, prinsip-prinsip, definisi dan teori tentang kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran, data dan fakta serta pengaruh perkembangan lingkungan strategis, untuk digunakan dalam menganalisis pada Bab III.
 - 3) **BAB III Pembahasan.** Membahas dan menganalisa permasalahan terkait status sosial ekonomi, konsep pengentasan kemiskinan, distribusi pendapatan dan pengurangan pengangguran, serta tujuan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi Myanmar.
 - 4) **BAB IV Penutup.** Menyimpulkan penulisan yang berisikan ikhtisar dari semua pokok bahasan yang ditulis dalam Bab I sampai dengan Bab III berikut rekomendasinya.

5. Metode Dan Pendekatan

- a. **Metode.** Metode penulisan Taskap ini adalah deskriptif analitis, yaitu hasil analisis dari penggambaran aspek-aspek yang ada hubungannya dengan permasalahan atau dasar teori-teori serta studi literatur.
- b. **Pendekatan.** Adapun dalam penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan gatra ekonomi yang dilakukan secara komprehensif integral.

6. Pengertian

- a. **Kemiskinan.** Bank Dunia mendefinisikan bahwa "kemiskinan adalah kelaparan, kurangnya tempat tinggal untuk hidup, kurangnya kemampuan untuk menyediakan layanan kesehatan, kurangnya belajar, belajar hanya untuk menulis dan membaca, dan kehilangan masa depan karena pengangguran".
- b. **Ketimpangan pendapatan.** Dimaknai sebagai adanya ketergantungan pada pendapatan keluarga atau pendapatan individu di negara tersebut dengan berbagai alasan. Penghasilan dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang akan dibelanjakan oleh keluarga dalam setahun.
- c. **Pengangguran.** Adalah status sosial seseorang yang belum bekerja meskipun secara aktif dan sukarela mencari pekerjaan, namun karena belum ada lowongan kerja tetap berstatus sebagai pengangguran. Pada kondisi tertentu ada juga orang-orang yang berpengalaman dan atau berkemampuan dalam bidangnya seperti bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya namun tidak memiliki pekerjaan yang cocok, sehingga hal itu menyebabkan peningkatan pengangguran.
- d. **Pembangunan Nasional Myanmar.** Pembangunan Nasional Myanmar adalah kondisi dinamis bangsa Myanmar yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional dalam membangun bangsa untuk siap menghadapi tantangan dan ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam guna dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Myanmar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Untuk membuat suatu konsep pemecahan masalah, maka diperlukan landasan pemikiran yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisa permasalahan dan sebagai landasan pengambilan kebijakan. Demikian juga di dalam membuat pemecahan masalah untuk membahas implementasi pembangunan nasional guna pengentasan masyarakat dari kemiskinan dalam rangka pembangunan nasional Myanmar diperlukan dasar dan landasan agar di dalam pembahasannya selalu mengacu kepada rambu-rambu yang sudah digariskan oleh segenap bangsa dan konstitusi Negara. Landasan pemikiran yang digunakan pada penulisan Taskap ini adalah landasan hukum berupa konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Myanmar serta landasan teori, data dan fakta serta pengaruh perkembangan lingkungan strategis.

8. Landasan Nasional

Konstitusi Myanmar: Dalam rangka untuk mendapatkan kemerdekaan secara cepat, Konstitusi itu buru-buru disusun, dan itu diadopsi oleh Majelis *Constituent* (konstituante) pada tanggal 24 September 1947. Setelah mencapai kemerdekaan, Parlemen Sistem Demokrasi dipraktekkan di Negara sesuai dengan Konstitusi Uni Myanmar. Namun, karena sistem demokrasi tidak dapat secara efektif terwujud, konstitusi baru Republik Sosialis Uni Myanmar dirancang berdasarkan sistem partai tunggal, dan setelah memegang Referendum Nasional, Negara demokratis sosialis didirikan pada tahun 1974. Konstitusi berakhir karena situasi umum terjadi pada tahun 1988.

Kemudian, karena aspirasi masyarakat, Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara melakukan upaya untuk mengadopsi sistem demokrasi multi-partai dan ekonomi pasar sesuai dengan tuntutan situasi nasional yang terjadi. Sebagai Konstitusi yang berlanjut (*sustainable*), yang menjamin keuntungan jangka panjang, telah menjadi penting bagi masa depan bangsa, selanjutnya Dewan

Perdamaian dan Pembangunan Negara menyelenggarakan Konvensi Nasional pada tahun 1993.

Orang-orang yang berpengalaman dalam berbagai aspek politik, keamanan, administrasi, ekonomi, sosial dan hukum serta ras nasional, perwakilan dari semua kota-kota mengambil bagian dalam Konvensi Nasional. Meskipun banyak kesulitan dan gangguan yang dihadapi oleh Konvensi Nasional, anggota parlemen *unwaveringly* berkumpul kembali pada tahun 2004 sesuai dengan tujuh langkah Roadmap yang diadopsi pada tahun 2003. Sebagai Konvensi Nasional mampu mengadopsi Prinsip-prinsip dan rincian dari Prinsip Dasar untuk merumuskan sebuah konstitusi, yang berhasil disimpulkan pada tanggal 3 September 2007. Konstitusi Republik Uni Myanmar melalui referendum nasional pada hari kesepuluh dari *Kasone Waning*, 1370 ME (Duapuluh-Kesembilan hari Mei 2008 AD) diberlakukan sebagai konstitusi Negara.

9. Peraturan Dan Perundang Undang Terkait

- a. UU No.35 tahun 2008. Tentang sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi pasar.⁶
- b. UUNo.36 tahun 2008.Mengatur tentang hak dan kewajiban Negara :
 - 1) Mengizinkan semua kekuatan ekonomi seperti negara, organisasiregional, koperasi, joint-venture, individu pribadi, sebagainya, untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi untuk pengembangan ekonomi nasional.
 - 2) Melindungi dan mencegah tindakan yang melukai kepentingan publik melalui monopoli atau manipulasi harga oleh seorang individu atau kelompok dengan maksud untuk membahayakan persaingan yang sehat dalam kegiatan ekonomi;
 - 3) Berusaha untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan pengembangan investasi.
 - 4) Tidak menasionalisasi usaha ekonomi.

⁶ Undang-undang Myanmar tahun 2008

- 5) Tidak menghilangkan nilai mata uang legal yg beredar.
- c. UU No.37 tahun 2008. Mengatur tentang Hak dan Kewajiban negara
- 1) Pemilik utama dari semua kekayaan negara dan semua sumber daya alam di atas dan di bawah tanah, di atas dan di bawah air dan di atmosfer.
 - 2) Memberlakukan hukum yang diperlukan untuk mengawasi ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya alam milik negara oleh kekuatan ekonomi.
 - 3) Mengizinkan warga negara mempunyai hak milik pribadi, hak warisan, hak inisiatif swasta dan paten sesuai dengan hukum.

10. Landasan Teori

- a. **Teori Pembangunan ekonomi.** adalah transformasi infrastruktur ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatakan arti ekonomi dan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada transformasi jumlah dan kualitas. Seorang ekonom, C. P Kindlebeger, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berarti pertumbuhan produk, namun pembangunan ekonomi mengacu tidak hanya pada pertumbuhan produk tetapi juga transformasi memproduksi teknologi dan organisasi infrastruktur serta perubahan untuk mendistribusikan pendapatan. Dengan demikian ide-ide pembangunan ekonomi lebih memperbesar ide-ide pertumbuhan ekonomi.

Menurut para ahli, Pembangunan Multi Dimensi Proses dan fakta bahwa transformasi infrastruktur sosial, organisasi politik dapat mengurangi dari ketidakadilan tingkat pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang terlibat dalam proses ini. Oleh karena itu, pengembangan berarti hidup dalam situasi yang baik dari fisik dan mental di kalangan masyarakat melalui kemajuan organisasi ekonomi dan sosial. Untuk mencapai pembangunan tersebut, pemerintah harus merumuskan tujuan seperti persyaratan dasar masyarakat, untuk meningkatkan

distribusi, untuk mempromosikan standar sosial, untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan kesempatan kerja, untuk memberikan pertimbangan khusus terhadap budaya dan sumber daya manusia yang berharga, untuk mendapatkan kondisi fisik yang lebih baik serta menjadi kepercayaan yang tinggi pada individu dan semua warga negara, dan meningkatkan pilihan ekonomis serta sosial.

Dalam proses pembangunan ekonomi, ada transformasi infrastruktur ekonomi pengentasan kemiskinan, gizi, kesehatan, pendidikan dan peningkatan standar sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi diukur dengan pertumbuhan GDP dan GNP dan kemudian gizi, kesehatan, indeks pendidikan, indeks pembangunan manusia (IPM) indeks kemiskinan manusia (IKM), indeks pembangunan gender (ketimpangan pria/wanita) (GDI) dan indeks keunggulan teknologi (TAI).

b. **Strategi Pembangunan Nasional**

Proses pembangunan Nasional melalui strategi pembangunan merupakan tugas pemerintah untuk mempromosikan standar kehidupan masyarakat dan kualitas hidup di daerah pedesaan. Arti dari pembangunan nasional dapat bervariasi antar negara–negara di seluruh dunia karena pembangunan nasional adalah prinsip yang mencakup berbagai elit (dari tingkat daerah dan tingkat internasional) dan pandangan yang berbeda (sosial, ekonomi, budaya, dll). Menurut Chamber, pakar ekonomi dari Amerika Serikat, bahwa pembangunan nasional adalah strategi dan kemajuan yang mendukung kebutuhan masyarakat di daerah pedesaan (anak-anak, jenis, kelamin, miskin, dan kaya). Dalam kemajuan ini meliputi kebutuhan dasar untuk hidup seperti tersedianya makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, jaminan sosial hidup dan infrastruktur.

Pembangunan Nasional memerlukan kestabilan dan cakupannya dapat diperluas sebagai prasyarat kelangsungan pembangunannya. Ini adalah skema dan kemajuan yang tidak akan mengkhawatirkan bagi

kebutuhan hidup generasi masa depan dalam menyediakan kebutuhan rakyat yang akan datang. Oleh karena itu, dalam program pembangunan daerah pedesaan yang stabil termasuk dukungan dasar seperti pada aspek sosial, ekonomi, teknologi, pendidikan dan kesehatan, ketidakesetaraan, pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan sumber daya alam. Untuk mendapatkan pencapaian pembangunan daerah pedesaan yang stabil kita perlu meletakkan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan menyediakan kebutuhan keuangan dan lainnya.

Dalam mempelajari cara untuk mendekati pembangunan di pedesaan kita dapat melihat struktur pembangunan yang mengubah secara kontemporer (*contemporarily*). Pada tahun 1990-an, strategi pembangunan yang dipromosikan sektor swasta dan penurunan peran negara dalam sektor ekonomi. Pada saat yang sama, negara memberi dorongan untuk sektor swasta, menetapkan aturan yang diperlukan dan menerapkan rezim pemerintahan yang bersih. Organisasi Non-pemerintah meningkatkan pengentasan kemiskinan dan skema pembangunan nasional bersama-sama dengan negara.

Saat ini, strategi untuk pembangunan nasional berubah. Kompatibilitas manusia dan pengembangan lingkungan harus berjalan dan pembangunan nasional serta pengentasan kemiskinan harus dilakukan demi sebuah kemajuan. Ideologi kompatibilitas manusia dan lingkungan pengembangannya didasarkan pada perlindungan lingkungan, menjaga sumber daya, mempromosikan penggunaan potensi negara, menekankan nilai sosial dan budaya demi memenuhi kebutuhan negara.

- c. **Definisi PBB tentang Kemiskinan.** Pada dasarnya, kemiskinan adalah ketidakmampuan memiliki pilihan dan peluang, pelanggaran martabat manusia. Ini berarti kurangnya kapasitas dasar untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat, karena tidak memiliki cukup makanan dan pakaian bagi keluarga, tidak memiliki sekolah atau klinik untuk kebutuhan

kesehatan, tidak memiliki tanah untuk menanam makanan seseorang atau pekerjaan untuk mencari nafkah, tidak memiliki akses ke kredit perbankan. Ini berarti ketidakamanan, ketidakberdayaan dan pengucilan individu, rumah tangga dan masyarakat. Ini berarti kerentanan terhadap kekerasan, dan seringkali menyiratkan tinggal di lingkungan yang marjinal atau rapuh, tanpa akses ke air bersih atau sanitasi.

11. **Data Dan Fakta.** Beberapa data dan fakta penyebab kemiskinan yang dapat dijadikan instrumen pembahasan untuk menganalisis permasalahan, sebagai berikut:

- a. **Perang Sipil dan Masalah Rasial.** Perang sipil dan masalah rasial mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara dan mendorong untuk terjadinya lingkaran setan kemiskinan. Jika suatu negara tidak memiliki penegakan hukum dan persatuan di antara kelompok ras, maka dapat menyebabkan kesulitan dalam produktivitas dan negara tersebut mungkin menghadapi pendapatan yang lebih rendah. Kondisi itu bisa menyebabkan masalah kemiskinan. Sebagai contoh: Kamboja menghadapi resesi ekonomi dan masalah sosial akibat perang saudara di tahun 1970. Ada dampak pada kehidupan sosial ekonomi setiap orang di negara itu sampai tahun 1990.
- b. **Kesalahan manajemen.** Sering terjadi tata kelola yang kurang baik di suatu negara, disebabkan oleh adanya penyuapan dan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, monopoli pasar oleh birokrasi pemerintah dan kroni nya, kelemahan dalam berorganisasi pada masyarakat sipil dan filantropi lainnya. Jika tidak ada perubahan dalam sektor administrasi pemerintah, maka hal yang demikian ini dapat menyebabkan kemiskinan.
- c. **Faktor Sosial.** Sumber daya manusia di suatu negara terutama tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan masyarakatnya berkontribusi banyak bagi perkembangan ekonominya. Sekalipun negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam, mereka dapat memperoleh manfaat dari produktivitas dan penciptaan teknologi baru yang lebih tinggi berkat

kepemilikan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Kemiskinan lebih buruk di negara-negara berkembang karena tingkat melek huruf yang rendah, pendaftaran yang menurun di sekolah-sekolah dasar, rasio guru dan siswa yang tidak seimbang dan bahaya penyakit menular seperti COVID 19, HIV / AIDS, TBC dan malaria. Lebih jauh, ledakan populasi adalah faktor dasar yang menyebabkan kemiskinan. Ketika tingkat kelahiran meningkat di negara-negara berkembang, populasi anak-anak di bawah 15 tahun meningkat dan negara-negara tersebut juga menghadapi masalah seperti pekerja anak, buta huruf, kurang kesehatan yang baik, dan kurang gizi.

Selain penilaian kemiskinan dengan cara-cara di atas, dapat diklasifikasikan lebih lanjut dengan faktor-faktor seperti tingkat Negara, tingkat organisasi dan tingkat rumah tangga. Di tingkat Negara, penyebab kemiskinan diantaranya adalah yang berasal dari alam dalam bentuk bencana alam, tantangan ekonomi dan sosial, salah urus, dan perang saudara. Perang saudara sering kali memberi dampak yang parah terhadap kemiskinan dan merupakan item terburuk.

Di tingkat organisasi lapis kedua, kelemahan infrastruktur ekonomi dan sosial adalah alasan utama kemiskinan. Infrastruktur ekonomi terdiri dari transportasi, komunikasi, distribusi air, sistem drainase dan sebagainya. Infrastruktur sosial meliputi sekolah, rumah sakit, sekolah pelatihan, penegakan hukum, layanan darurat dan sebagainya. Selain itu, jaringan sosial dan modal sosial merupakan aspek penting di tingkat organisasi sosial.

Dengan memperluas organisasi masyarakat sipil, kebutuhan masyarakat miskin dapat terpenuhi. Langkah ini dapat berkontribusi banyak bagi perkembangan masyarakat miskin. Di tingkat rumah tangga, penyebab kemiskinan terutama melibatkan ukuran rumah tangga, jumlah tanggungan, pendapatan, kesehatan, pendidikan dan standar sosial. Jika sebuah rumah tangga memiliki banyak anak-anak dan orang tua yang

tidak mampu karena mengganggu atau tidak punya pekerjaan tetap, maka kondisi ini mengakibatkan kemiskinan. Tingkat potensi kemiskinan tinggi ketika sebuah rumah tangga dipimpin oleh wanita/ janda atau *single parent* berpenghasilan rendah, kurangnya kesempatan untuk memiliki bidang tanah dan penindasan yang tinggi dapat mengakibatkan kemiskinan. Selain itu, masalah sosial dalam rumah tangga juga menjadi penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan di tingkat individu adalah usia, pendidikan, kesehatan, kondisi kerja dan ada sedikit karena diskriminasi ras/etnis.

12. Perkembangan Lingkungan Strategis.

- a. **Lingkungan Global.** Upaya implementasi pembangunan pedesaan guna pengentasan masyarakat dari kemiskinan dalam rangka ketahanan nasional Myanmar tentunya akan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis yang meliputi perkembangan lingkungan global, regional dan nasional. Di dalam era globalisasi ini dunia sudah bagaikan tanpa batas dan saling mempengaruhi. Setiap terjadi perubahan pada tataran global akan mempengaruhi lingkungan regional yang selanjutnya akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan nasional.

Lingkungan strategis disamping akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dapat menimbulkan pengaruh yang negatif karena perbedaan budaya asing dengan budaya bangsa Myanmar. Oleh sebab itu aspek dominan yang mempengaruhi kelangsungan hidup bangsa dan negara Myanmar adalah dinamika lingkungan strategis yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Selain menawarkan peluang, aspek ini juga dapat menimbulkan kendala yang harus diperhitungkan secara seksama.

Perkembangan aspek kehidupan global merupakan perkembangan isu-isu global yang akan terus menerus mewarnai, mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap lingkungan strategis saat ini, yaitu antara lain: fluktuasi harga minyak dunia, perubahan iklim, krisis ekonomi,

dominasi negara-negara maju, dinamika politik dan keamanan internasional, tuntutan demokratisasi dan hak asasi manusia, serta perubahan kekuatan dunia yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan serta pandemi seperti penyebaran Covid 19 yang dampaknya sangat besar terhadap seluruh negara.

Dampak dari kemajuan teknologi, transportasi dan komunikasi serta informasi, maka kegiatan ekonomi dan perdagangan dunia menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Globalisasi dibidang ekonomi yang terbentuk melalui kesepakatan bilateral maupun multilateral seperti GATT, NAFTA, AFTA, dan APEC, mengakibatkan saling ketergantungan dan persaingan antar negara semakin meningkat. Globalisasi ekonomi menuntut kualitas yang tinggi dalam arti kualitas produksi, kualitas distribusi, ketepatan waktu dan harga bersaing. Perkembangan arus modal dan persaingan tajam untuk menarik investasi pihak swasta pelaku ekonomi nasional.

Pembangunan perekonomian Myanmar tentunya akan terpengaruh oleh perkembangan perekonomian dunia, sehingga bangsa Myanmar memerlukan system perekonomian sendiri yang dapat bertahan dari pengaruh ekonomi global tersebut. Departemen pembangunan di bawah departemen peternakan perikanan dan pembangunan pedesaan Myanmar menggabungkan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan pedesaan.

Selama periode pasca 2011, kolaborasi antara organisasi internasional yang disebutkan di atas berbeda sesuai dengan jenis program dan proyek pembangunan driven masyarakat nasional seperti program berbasis masyarakat enam tahun dimulai pada tahun 2012 dengan dukungan dari Bank Dunia. Program ini memberikan bantuan kepada setiap desa dengan mata uang Myanmar setara dengan USD 27,000. Program ini mencakup semuanya, dengan tambahan 640 desa lagi dengan dana yang disetujui sebesar USD 80 juta. Program ini mencakup penyediaan infrastruktur dasar dan layanan untuk masyarakat miskin dengan program

berbasis masyarakat, meningkatkan efisiensi pemerintah, dan secara efektif merespon situasi bencana dan kedaruratan. Program ini dilakukan atas dasar konsensus masyarakat dan terutama mencakup konstruksi dan perbaikan sekolah, rumah sakit, tempat umum, dan dermaga di daerah pedesaan serta meningkatkan pertanian dan listrik.⁷

- b. **Lingkungan Regional.** Perubahan yang terjadi dalam lingkungan global akan membawa pengaruh terhadap kawasan Asia Pasifik dan ASEAN, yang keduanya merupakan lingkungan regional terdekat Myanmar. Pengaruh dibidang politik dapat dilihat dari kesadaran negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN yang semakin berkembang mengenai ide-ide pembangunan dibidang ekonomi. Pengaruh dibidang ekonomi global mengakibatkan negara di kawasan ASEAN semakin tergantung antara yang satu dengan yang lain dibidang ekonomi, tetapi sebaliknya juga dapat merupakan sumber konflik. Khusus negara vietnam sebagai lumbung padi di ASEAN dimana memiliki stabilitas ekonomi yang cukup mantap hal ini dampak dari meningkatnya hasil pertanian dan kelautan, sementara dampaknya ke Myanmar dapat memberikan bantuan kebutuhan akan pangan nasional.

Dengan terbentuknya pasar bebas ASEAN (AFTA) pada tahun 1992, pemberlakuan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China atau Wilayah Perdagangan Bebas Asean Cina dari tahun 2010 mengakibatkan berbagai produk Cina membanjiri pasaran di Myanmar dengan harga murah dan kompetitif, hal ini akan mempengaruhi pasar produk dalam negeri Myanmar, serta dengan telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015, menuntut negara Myanmar untuk membangun kesiapan menghadapi masalah tersebut.⁸

ASEAN memprakarsai pengembangan wilayah pedesaan dan sektor pengentasan kemiskinan daerah pada pertemuan tingkat tinggi yang

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/kerjasama_internasional

⁸https://www.bsn.go.id/uploads/download/AEC_2015_BSN_Hendri_Saparini1.pdf

diselenggarakan di Malaysia pada tahun 1997. Pertemuan mengadopsi resolusi untuk mengadakan pertemuan tingkat menteri setelah dua tahun dan pertemuan perwira tinggi tahunan.

c. **Lingkungan Nasional Myanmar**

1) **Politik.** Setelah merdeka negeri ini diwarnai perselisihan etnis Myanmar dan menyebabkan perang saudara yang belum terselesaikan. Selama ini, Amerika Serikat dan beberapa organisasi lain telah melaporkan pelanggaran HAM yang konsisten dan sistematis di negeri ini. Pada tahun 2011, junta militer secara resmi dibubarkan setelah pemilihan umum 2010 dan beralih ke pemerintahan sipil. Meski militer mempertahankan pengaruh yang sangat besar melalui konstitusi yang disahkan pada tahun 2008, telah mengambil langkah-langkah secara bertahap melepaskan kontrol atas pemerintahan. Ini bersamaan dengan pembebasan aktivis HAM Myanmar yang paling terkemuka, Aung San Su Kyi, dan banyak tahanan politik lainnya, telah meningkatkan catatan hak asasi manusia negara dan hubungan luar negeri dan telah menyebabkan pelanggaran perdagangan dan sanksi ekonomi lainnya yang telah dikenakan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Pada 2013, telah terjadi dorongan untuk perubahan dan reformasi di Myanmar, sebagai konsekuensinya maka jalan menuju reformasi politik lebih bermakna setelah dimasukkannya Aung San Su Kyi dalam proses politik. Selain kembali mendaftar-lagi pada level nasional untuk demokrasi sebagai partai politik yang sah adalah fakta bahwa Aung San Su Kyi telah bertarung dalam pemilu 2012. Pada awal April 2012, Aung San Su Kyi kembali memasuki ranah politik yang terpilih setelah memenangkan kursi di parlemen negara itu. Pada bulan Agustus, mantan tahanan hati nurani Aung San Su Kyi ditunjuk sebagai Ketua Komite Parlemen yang baru untuk menata aturan hukum dan

ketertiban. Saat ini, Aung San Su Kyi dan beberapa pihak mencoba untuk memperbaiki konstitusi (2008).

- 2) Ekonomi.** Sejak 2010, pemerintah telah memulai sebuah program reformasi ekonomi, politik dan pemerintahan yang ambisius. Ini telah memulai serangkaian reformasi untuk menghilangkan distorsi ekonomi, seperti mata uang mengambang, peraturan fiskal baru untuk merasionalisasi pajak penghasilan pribadi dan mengurangi pajak konsumsi, liberalisasi sektor telekomunikasi, reformasi bertujuan untuk mengembangkan sektor swasta dan merangsang investasi asing langsung, ulasan dari sektor keuangan, promosi akses terhadap pembiayaan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penciptaan lapangan kerja.

Reformasi ini mulai membaik, Ekonomi Myanmar tumbuh 7,3 persen pada 2012/ 2013.⁹Pendorong utama pertumbuhan meningkat adalah produksi gas, jasa, konstruksi, investasi asing langsung, dan ekspor komoditas yang kuat. Perekonomian diproyeksikan tumbuh sebesar 7,5 persen pada 2013/ 2014 dan meningkat menjadi 7,8 persen dalam jangka menengah karena terus bertambahnya produksi gas, peningkatan perdagangan dan kinerja yang kuat di bidang pertanian.

Meskipun kinerja ekonomi yang positif baru-baru ini, Myanmar masih tetap menghadapi sejumlah tantangan. Ini adalah salah satu negara termiskin di Asia Timur dan Pasifik, dengan PDB per kapita diperkirakan sebesar \$ 868 di 2012/ 2013 dan angka kemiskinan adalah 26 persen menurut survei rumah tangga nasional tahun 2010. Myanmar adalah negara yang kaya akan batu giok dan permata, minyak, gas alam dan sumber daya mineral lainnya.

Diperkirakan akan tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 5,5 %. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang baik, diyakini bahwa potensi

⁹ <https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-october-2013>

ekonomi Myanmar tidak akan mudah dicapai karena kurangnya pembangunan. Pada 2013, menurut Indeks pembangunan manusia (IPM), Myanmar memiliki salah satu tingkat terendah dari pembangunan manusia di dunia. PDB diperkirakan telah mencapai angka \$ 55 milyar di 2012/ 2013. Setelah ekspor beras Myanmar berkurang, sekarang ekspor Myanmar dari sumber daya alam seperti gas dan permata menjadi semakin signifikan.

- 3) **Sosial Budaya.** Kebanyakan indikator sosial menunjukkan sangat rendah. Misalnya, 32 persen anak balita menderita gizi buruk. Terbatasnya akses, kurangnya infrastruktur, menjadi hambatan utama untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dan pembangunan ekonomi. Keadaan umum kesehatan di Myanmar relatif masih miskin. Pemerintah menghabiskan dana sebesar 0,5% menjadi 3% dari PDB negara itu pada perawatan kesehatan, peringkat yang konsisten di antara yang terendah di dunia. Meskipun perawatan kesehatan adalah nominal bebas, pada kenyataannya, pasien harus membayar untuk obat-obat dan pengobatan, bahkan di klinik umum dan rumah sakit. Rumah sakit umum kurang banyak fasilitas dasar dan peralatan yang tersedia.

HIV/ AIDS diakui sebagai penyakit yang menjadi perhatian oleh Department Kesehatan Myanmar, yang paling umum di kalangan pekerja seks dan pengguna narkoba suntikan. Pada juni 2011, dana populasi negara-negara bersatu merilis sebuah laporan tentang data baru tenaga kerja kesehatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kematian bayi baru lahir dan ibu untuk 58 negara. Tahun 2010 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran untuk Myanmar adalah 240. Ini dibandingkan dengan 219,3 pada tahun 2008 dan 662 pada tahun 1990 di bawah 5 angka kematian, per 1.000 kelahiran adalah 73 dan kematian baru lahir sebagai persentasi dari bawah mortalitas 5 adalah 47. Sementara untuk pandemi Covid 19 di Myanmar relatif kecil dibandingkan dengan negara - negara ASEAN lainnya, Total kasus

sampai dengan 16 Agustus 2020 sebesar 643 yang sembuh 349 dan yang meninggal dunia 6.

Sistem pendidikan Myanmar dioperasikan oleh instansi pemerintah, Departement pendidikan. Universitas dan lembaga profesional dari atas Myanmar dan bawah Myanmar dijalankan oleh dua entitas yang terpisah, Departement Pendidikan Tinggi Atas myanmar dan Departement Pendidikan Tinggi bawah Myanmar. Markas yang berbasis di Yangon dan Mandalay masing-masing. Sistem pendidikan didasarkan pada sistem Britania Raya, karena hampir satu abad kehadiran Inggris dan Kristen di Myanmar. Hampir semua sekolah yang dioperasikan pemerintah, namun telah terjadi kenaikan baru-baru ini yang didanai swasta sekolah bahasa Inggris. Sekolah adalah wajib sampai akhir sekolah dasar, pada umur 9 tahun, sedangkan usia wajib belajar adalah 15 atau 16 di tingkat internasional.

Ada 101 perguruan tinggi, 12 lembaga, 9 perguruan tinggi derajat dan 24 perguruan tinggi di Myanmar, total 146 institusi pendidikan tinggi. Telekomunikasi dan akses internet juga sangat terbatas. Sekitar 73 persen penduduk tidak memiliki akses listrik, dan konsumsi listrik adalah salah satu yang terendah di dunia, 20 kali lebih dari rata-rata dunia. Masih ada infrastruktur listrik hanya dapat memenuhi sekitar setengah dari permintaan saat ini, sehingga sering padam dan penjangkauan pasokan listrik. Akses terhadap air minum juga terbatas di banyak daerah. Sementara itu hampir setengah jalan tidak bisa dilewati selama musim hujan.

- 4) **Pertahanan dan Keamanan.** Myanmar adalah masyarakat multi-budaya, multi-rasial, dan multi-agama. Secara resmi, ada 135 daerah (etnis) kelompok bawah delapan komunitas etnis utama. Perkiraan populasi (sensus terakhir adalah pada tahun 1983) menunjukkan bahwa mayoritas Bamar (sebelumnya disebut Burman) kelompok etnis merupakan lebih dari 60 persen, sementara non-pribumi

(terutama berasal dari Cina dan India) berjumlah sekitar 5 persen total populasi. Secara politik, geografis, dan demokratis realitas ini sangat dipengaruhi elit penguasa Myanmar dalam perspektif mereka pada keamanan nasional, dan peran militer dalam pemerintahan politik.

Berbagai alasan utama yang berhubungan dengan Myanmar berdasarkan pengalaman sejarah penjajahan, perang Dunia II, perang sipil dan Perang Dingin, serta sifat multietnis pemerintahannya, pemerintah Myanmar berturut-turut selalu menerapkan pendekatan kebijakan keamanan nasional negara dengan banyak penekanan kepada semua etnis. Selama ini, prospek keamanan Myanmar telah disibukkan dengan ancaman domestik, berupa konflik vertikal paling serius yang ditandai dengan tantangan keras dari berbagai pemberontakan etnis dan ideologis yang sangat membebani dimensi militer.

Berbagai pemberontakan etnis Myanmar di pinggiran negara, telah berhasil menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan 14 kelompok etnis yang relevan, hanya menyisakan dua etnis Kachin dan Palaung. Tapi beberapa dekade konflik dengan pemerintah Myanmar telah menimbulkan kebencian, ketidakpercayaan dan sinisme di antara kelompok-kelompok etnis. Semua ini tidak bisa dihapus dalam beberapa bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Perundingan damai, gencatan senjata nasional adalah satu hal yang benar-benar penting. Pada saat ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perspektif keamanan secara keseluruhan dari pemerintah Myanmar dan militer jelas menyimpang dari realita negara penjaga paradigma masa lalu. Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) adalah otoritas tertinggi pada keamanan nasional.

d. **Peluang dan Kendala**

1) **Peluang**

- a) Diterapkannya pasar bebas membuka peluang bagi masyarakat untuk bisa memudahkan mendapatkan kebutuhan hidupnya dengan harga yang lebih terjangkau.
- b) Sumber kekayaan alam terutama bahan tambang yang cukup besar, apabila dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan perekonomian nasional.
- c) Stabilitas politik yang mantap, sangat mendukung upaya pemerintah melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Kepatuhan masyarakat kepada pemerintah dan juga kepada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

2) **Kendala**

- a) Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah akan dapat menjadi kendala dalam upaya pemerintah meningkatkan pembangunan di perdesaan.
- b) Masih terbatasnya sarana dan prasarana perekonomian di perdesaan akan menyulitkan upaya menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
- c) Anggaran pemerintah yang terbatas saat ini masih menjadi kendala untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
- d) Adanya pandemi Covid 19 sangat berpengaruh terhadap program pembangunan ekonomi Myanmar karena dampaknya terhadap lapangan kerja yang berkurang dan terjadi PHK sebagai akibat

ditutupnya beberapa industri, pariwisata dan transportasi yang juga terjadi di banyak negara saat ini.



BAB III

PEMBAHASAN

13. Umum

Negara Myanmar adalah negara berkembang yang menghadapi masalah kemiskinan seperti negara-negara berkembang lain di dunia. Oleh karena itu penyusunan indikator-indikator pembangunan sosial untuk meningkatkan ukuran pendapatan per kapita yang tidak lagi memadai dengan mengalisis berbagai komponen yang mewakili nilai-nilai yang berlaku di dunia internasional seperti kesehatan, gizi, pendidikan, perumahan, pendapatan perorangan dan penyusunan indikator-indikator statisnyamenjadi perhatian utama. Komponen-komponen indikator sosial seperti kesehatan yang lebih baik, gizi yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik dan sebagainya harus dipandang sebagai kunci-kunci pertumbuhan (Singers, 1965, hal 6) paradigma ini berasumsi bahwa kemiskinan merupakan kondisi kesejahteraan yang rendah (kesehatan jelek, gizi jelek, pendidikan jelek dan sebagainya) kemiskinan harus dituntaskan melalui perbaikan tingkat kesejahteraan golongan miskin. Paradgima ini mengabaikan kenyataan bahwa dalam banyak kasus kemiskinan merupakan hasil dari struktur yang ada dan oleh karenanya hanya bisa dikurangi melalui transformasi struktural. Mendefnisikan pembangunan dengan cara seperti ini telah membuat paradigma ini tidak peka terhadap variabel struktural pembangunan. Akibatnya, alur pemikiran indikator sosial dianggap sebagai paradigma yang paling tidak radikal, karena sekitar 70% dari populasi di Myanmar tinggal di pedesaan. Tujuan utama dari tugas-tugas pembangunan ini adalah untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat di pedesaan. Setiap negara di dunia saat ini, memerangi kemiskinan.

14. Masalah utama penyebab kemiskinan di Myanmar.

- a. **Pendidikan.** Di Myanmar, banyak keluarga mengalami kemiskinan ekstrim, terutama di pedesaan. Para orang tua memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya, padahal pendidikan dasar gratis dan disediakan oleh pemerintah. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah adalah korban utama dari masalah ini. Terlepas dari perubahan politik dan

ekonomi yang melanda Myanmar dalam beberapa tahun terakhir, kemiskinan terus menjadi faktor penentu dalam akses anak-anak ke pendidikan dasar. Banyak anak bekerja untuk membantu keluarga mereka mencari nafkah.

Sistem pendidikan dasar di Myanmar saat ini terdiri dari enam tahun pendidikan dasar (Kelas 1 hingga Kelas 6), tiga tahun pendidikan menengah pertama (Kelas 7 hingga Kelas 9) dan dua tahun pendidikan menengah atas (Kelas 10 dan Kelas 11). Alokasi anggaran ke Kementerian Pendidikan sebesar 1.784 miliar MMK pada 2017/18. Selama 6 tahun terakhir ini telah menjadi lebih dari dua kali lipat sebagai bagian dari total anggaran Union, dan sekarang mewakili 7,75% dari total pengeluaran pemerintah.¹⁰

Tujuan reformasi pendidikan adalah untuk mentransformasikan struktur sekolah dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara. Reformasi pendidikan membutuhkan pemeriksaan holistik atas alasan, tujuan, penerapan, dan manfaat yang dihasilkan, oleh orang-orang yang berada dalam sistem sekolah tempat mereka memperoleh pendidikan. Ketimpangan pendapatan sebagai faktor utama penyebab ketidakstabilan nasional mengutip bahwa negara-negara dengan ketimpangan yang tinggi lebih cenderung jatuh ke dalam krisis keuangan, dan kecil kemungkinannya untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketimpangan pendidikan yang merajalela juga merusak pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan bermanfaat bagi masyarakat untuk mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengurangi kejahatan, meningkatkan lapangan kerja, dll. Dan juga membantu individu untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan oleh karena itu dapat meningkatkan standar hidup masyarakat.

¹⁰<https://www.childfund.org.au/stories/afraid-not-be-able-to-learn/>

Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih mungkin untuk belajar tentang kesehatan dan resiko kesehatan, meningkatkan kemampuan baca tulis dan pemahaman mereka tentang apa yang bisa menjadi masalah kompleks yang penting bagi kesejahteraan mereka. Pendidikan meningkatkan keterampilan seperti melek huruf, mengembangkan kebiasaan yang efektif, dan dapat meningkatkan kemampuan kognitif.

- b. Kesehatan.** Rumah tangga Myanmar, jauh di bawah garis kemiskinan nasional karena pengeluaran kesehatan yang relatif tinggi. Angka yang sesuai untuk garis kemiskinan pada tahun 1990 adalah bahwa 1,6 juta orang menjadi miskin, dan pada tahun 2015 karena pengeluaran kesehatan dari kantong sendiri, kemiskinan semakin meningkat.¹¹

Kemiskinan di daerah pedesaan Myanmar secara substansial lebih tinggi dibandingkan dengan laporan rumah tangga yang kehabisan makanan karena kurangnya sumber daya. Kesehatan yang buruk adalah guncangan paling umum terhadap kesejahteraan yang dilaporkan oleh rumah tangga.

Seperti yang digambarkan oleh kasus-kasus ini, orang miskin di Myanmar memiliki akses terbatas ke perawatan kesehatan berkualitas. Ada dampak substansial pada kesejahteraan psikologis, sosial, dan ekonomi yang terkait dengan kesehatan yang buruk, yang berkontribusi pada masalah akses perawatan kesehatan. Dengan cara ini, masyarakat terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan kesehatan yang buruk.

Karena Myanmar terus melakukan reformasi dan perhatian tambahan serta sumber daya dikhususkan untuk mengatasi kemiskinan yang meluas dan masalah terkait kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan finansial, penting untuk mengenali hubungan antara kemiskinan dan kesehatan. Keadaan kesehatan saat ini dalam kehidupan orang miskin di Myanmar berpotensi untuk menginformasikan kebijakan masa depan dan arah program untuk negara tersebut, baik secara internal,

¹¹<https://journalofburmesescholarship.org/issues/v1n1/8b-Zaw-Pepper-en.pdf>

maupun berkaitan dengan bantuan luar negeri. Orang-orang di Myanmar terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan yang membatasi akses perawatan kesehatan dan biaya perawatan kesehatan yang mahal sebagai sebab dan akibat. Penyediaan perawatan kesehatan masyarakat di Myanmar tidak memadai dan berkualitas rendah, yang semakin memperburuk krisis kesehatan dan berkontribusi pada kemiskinan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kemiskinan sangat berkorelasi dengan kondisi kesehatan yang buruk secara global.

Pandemi Virus CORONA (COVID-19 membuat lebih dari 60.000 pekerja menganggur di Myanmar", 28 April 2020 Lebih dari 60.000 pekerja di seluruh negeri telah kehilangan pekerjaan mereka karena penutupan pabrik yang disebabkan oleh pesanan yang dibatalkan dan gangguan pasokan bahan baku. U Myo Aung, Sekretaris Tetap Tenaga Kerja, Imigrasi dan Kependudukan, mengatakan 175 pabrik telah berhenti beroperasi. "Lebih dari 60.000 orang menganggur," katanya. "Semuanya diselesaikan di lebih dari 70 pabrik, tapi di 105 pabrik, para pekerjanya belum dibayar."¹²

Dalam pernyataannya mengatakan bahwa alasan penutupan dan pengurangan tenaga kerja, karena kurangnya bahan baku, dan kurangnya pesanan di tengah pandemi COVID-19 dan masalah sewa lahan. Menteri menambahkan bahwa dari 15 pabrik yang terkena dampak, sembilan berhenti beroperasi secara permanen, enam berhenti sementara, dan dua mengurangi jumlah pekerja.

Jika pandemi berlarut-larut, ekonomi dapat berkontraksi sebanyak 2,5 persen pada TA 2019/20, dan dengan pemulihan yang diharapkan pada 2020/21 yang semakin panjang dan belum pasti maka akan berdampak pada risiko penurunan lebih lanjut. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dapat mengancam sebagian program pembangunan yang sedang

¹²<https://www.business-humanrights.org/en/myanmar-covid-19-leaves-over-60000-jobless-workers-in-105-factories-remain-unpaid>

berjalan dan pada gilirannya dapat membalikkan kemajuan yang telah diraih oleh Myanmar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan sekaligus mengurangi kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Dalam desain skenario, di mana penyebaran domestik dari virus korona dapat dikendalikan, ekonomi global dengan cepat pulih, dan tingkat pertumbuhan PDB Myanmar diproyeksikan akan kembali naik ke 7,2 persen pada tahun fiskal 2020/21, maka tingkat kemiskinan akan berkurang dalam waktu singkat. Dalam jangka panjang tentunya tidak akan segera pulih kembali ke level sebelum krisis hingga TA 2021/22. Sementara itu dalam skenario dengan kecenderungan yang menurun, tingkat kemiskinan akan berada tetap di atas tingkat sebelum krisis sampai setidaknya TA 2022/23.

c. Adanya Organisasi Bersenjata Etnis. Sejumlah konflik etnis yang membingungkan telah berlangsung dalam berbagai bentuk dan intensitas di Myanmar sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Banyak milisi kecil masih beroperasi di daerah perbatasan, dan lebih dari 20 kelompok etnis bersenjata menguasai bagian negara, terutama di daerah terpencil dan perbatasan. Pemerintah semi-sipil yang terbentuk pada tahun 2011 telah melakukan upaya bersama untuk mencapai solusi komprehensif atas konflik etnis, termasuk penandatanganan 16 perjanjian gencatan senjata bilateral dalam beberapa tahun terakhir. Dorongan saat ini adalah untuk mencapai gencatan senjata nasional yang telah disepakati pada tahun 2014 yang akan memberikan konteks bagi dialog politik untuk menangani secara lebih sistematis masalah-masalah kritis yang menghalangi perdamaian sejati. Prosesnya tidak akan mudah, masalah intinya adalah tentang kekuasaan fundamental dan pengaturan pembagian kekayaan sebagai inti dari solusi abadi yang terkenal sulit untuk didefinisikan, dinegosiasikan, dan menemukan kompromi yang dapat diterima oleh para pemangku kepentingan utama dalam konflik. Ujian bagi Myanmar sekarang, dengan momentum negosiasi perdamaian mencapai tahap kritis. Proses tersebut saat ini

mencakup semua pemangku kepentingan utama pemerintah, parlemen, tentara, dan kelompok etnis bersenjata dan ada keyakinan yang cukup untuk gerakan maju untuk mempertimbangkan masalah inti pengaturan pembagian kekuasaan dan kekayaan yang tidak terbayangkan selama beberapa dekade.

Konflik etnis Myanmar memiliki akar sejarah yang dalam dan berkisar pada keluhan politik tentang bentuk negara, pembagian kekuasaan, dan kesetaraan etnis. Menurut EAO utama, tidak akan ada perdamaian nyata tanpa negosiasi politik tentang masalah penentuan nasib sendiri etnis dan federalisme. Penyebab utama konflik etnis adalah keluhan politik terkait penentuan nasib sendiri etnis, representasi dan kesetaraan, keluhan keamanan dan pembangunan terkait perang, dan ketidakpercayaan dan kebencian yang dipicu oleh inisiatif perdamaian yang gagal.

Sejak pemerintahan Thein Sein berkuasa pada tahun 2011, Myanmar telah mulai meliberalisasi ekonominya dan berusaha membangun negara yang lebih sah dan responsif, didukung dengan antusias oleh Barat dan sekutu regionalnya. Hal ini menyebabkan peningkatan dramatis dalam bantuan kepada negara, dan normalisasi hubungan bantuan, yang berarti bahwa dana semakin sejalan dengan prioritas pemerintah, seperti yang disyaratkan oleh kesepakatan internasional utama. Yang paling terlihat, ini telah memulai proses perdamaian multilateral yang telah membawa lebih dari 20 EAO kontemporer ke meja perundingan.¹³ Sementara itu, Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw) telah meningkatkan kehadirannya di wilayah-wilayah penting, mempertahankan operasi kontra-pemberontakan reguler di beberapa wilayah, sementara pemerintah memperluas jangkauan administratifnya ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak diatur oleh negara.

Penguasaan atas sumber daya alam telah menjadi pemicu utama konflik di wilayah etnis. Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk

¹³<https://asiafoundation.org/resources/pdfs/MMEthnicConflictandSocialServices.pdf>

mengadopsi standar internasional dalam pengelolaan sektor pertambangan.

Beberapa wilayah yang diperebutkan atau dikendalikan oleh kelompok etnis bersenjata memiliki sistem tata kelola sumber daya yang paralel. Dengan demikian, pembagian kekayaan dalam sumber daya alam menjadi perhatian utama untuk desentralisasi demokratis dan resolusi konflik.

15. **Kondisi sosial ekonomi di Myanmar pada masa demokrasi.** Setelah hampir 50 tahun kediktatoran militer, dan setelah pemilihan umum 2010 yang dicurangi untuk mendukung Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP) militer, Myanmar mengalami serangkaian reformasi politik mulai tahun 2011 dan seterusnya.¹⁴ Pada November 2015, pemilihan umum yang bebas pertama sejak pemilu 1990 menghasilkan kemenangan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). NLD membentuk pemerintahan baru pada tahun 2016 dengan Htin Kyaw sebagai presiden non-militer pertama sejak 1962, dan dengan Aung San Suu Kyi dalam posisi Penasihat Negara yang baru dibentuk.

Kepentingan utama militer adalah melindungi kedaulatan, persatuan, dan stabilitas nasional. Dengan pergantian pemerintahan pada tahun 2011 datangnya serangkaian reformasi politik untuk mendukung hak-hak dasar sipil, demokrasi elektoral, dan pertumbuhan ekonomi. Sejak 2011 dan seterusnya, reformasi ini juga membuka peluang bagi negara-negara Barat untuk menanggung atau mencabut sanksi dan terlibat dalam pembangunan kapasitas negara, dan bagi badan-badan PBB dan LSM internasional untuk memperkuat keterlibatan mereka dalam membantu Myanmar.

Myanmar memiliki salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,5% selama periode 2012–2016, dan ini diperkirakan akan terus berlanjut selama beberapa tahun. Salah satu penjelasan dari pertumbuhan ekonomi yang cepat adalah populasi muda negara, yang membantu memastikan pertumbuhan yang tinggi dalam konsumsi dan

¹⁴<https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-political-economy-analysis>

pendapatan selama periode 2015-2025. FDI dan sumber pertumbuhan, Myanmar memiliki kebutuhan yang mendesak akan penanaman modal asing (FDI), di antaranya, Myanmar memiliki kebutuhan investasi sektor kelistrikan terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara. Pada tahun 2016-2017, investor menjadi semakin berhati-hati dan khawatir dengan lambatnya reformasi ekonomi. Infrastruktur yang terbatas tetap menjadi rintangan utama bagi pertumbuhan ekonomi, misalnya, setelah dibuka pada tahun 2012, Myanmar menarik banyak organisasi dan donor internasional. Bantuan melonjak sebesar 788% hanya dalam waktu satu tahun, dari USD 504 juta pada tahun 2012 menjadi USD 4,5 miliar pada tahun 2013. Myanmar membutuhkan bantuan pembangunan yang cerdas yang dapat mempertimbangkan banyak faktor lokal. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan koordinasi donor setelah pemerintah NLD berkuasa, masih banyak yang harus dilakukan.

Pada Maret 2012, Pyidaungsu Hluttaw mengesahkan undang-undang yang akan menaikkan gaji semua pegawai sektor publik, termasuk tentara, biaya tambahan tunjangan hidup 30.000 kyat (US \$ 38), bersama dengan kenaikan upah harian 1.100 menjadi 2.100 kyat (\$ 1,40– \$ 2,70) untuk karyawan penuh waktu, konon untuk memberantas korupsi di pemerintahan.

Menyusul reformasi pemerintah pada tahun 2011 dan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton ke negara itu, AS mengumumkan beberapa inisiatif, termasuk pencabutan beberapa pembatasan bantuan luar negeri, yang bertujuan untuk kembali terlibat dengan Myanmar. Pada bulan September 2016, Undang-Undang Strategi Burma Cardin-McCain tahun 2016, bagian dari undang-undang AS yang diajukan bipartisan, diperkenalkan ke Senat. Undang-undang tersebut berupaya untuk menetapkan “tolok ukur dan pedoman” pada keringanan sanksi dengan meminta Menteri Luar Negeri AS untuk menilai dan membuat rekomendasi terkait dengan perubahan atau pencabutan sanksi, dengan fokus pada isu-isu seperti demokrasi dan rekonsiliasi etnis. Undang-undang tersebut juga akan mengizinkan bantuan kemanusiaan, mengotorisasi bantuan ekonomi untuk mendukung kelompok masyarakat sipil Burma, membuat Dana Pembangunan

Burma – Amerika Serikat untuk mendorong investasi sektor swasta dan mengizinkan hubungan militer-militer yang terbatas.

Meskipun pemerintah telah dipuji [oleh siapa?] Untuk reformasi tersebut, banyak negara tetap "optimis secara hati-hati". ASEAN telah menyetujui tawaran Burma untuk kursi pada 2014. Amerika Serikat, Australia, dan UE telah menyerukan tindakan lebih lanjut, seperti pembebasan tanpa syarat semua tahanan politik, sebagai prasyarat untuk pencabutan sanksi internasional terhadap pemerintah Myanmar. Amerika Serikat menunjuk utusan khusus, Derek Mitchell untuk memetakan kebijakan baru dari Myanmar yang jauh dari isolasi.

Sejak 2011, Myanmar telah memulai reformasi kebijakan undang-undang antikorupsi, nilai tukar mata uang, undang-undang investasi asing, dan perpajakan. Investasi asing meningkat dari US \$ 300 juta pada tahun 2009-10 menjadi US \$ 20 miliar pada tahun 2010–11, (sekitar 667%). Arus masuk modal yang besar menghasilkan penilaian yang lebih kuat terhadap kyat (mata uang Burma) sekitar 25 persen. Sebagai tanggapan, pemerintah melonggarkan pembatasan impor dan menghapus pajak ekspor. [Rujukan?] Terlepas dari masalah mata uang saat ini, ekonomi Burma diperkirakan akan tumbuh sekitar 8,8 persen pada tahun 2011. Pada Maret 2012, rancangan undang-undang investasi asing muncul, yang pertama dalam lebih dari 2 dekade. Undang-undang ini akan mengawasi liberalisasi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang asing tidak lagi membutuhkan mitra lokal untuk memulai bisnis di negara tersebut, karena mereka akan dapat menyewa tanah secara legal. Rancangan undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa warga negara Burma harus merupakan setidaknya 25% dari tenaga kerja terampil perusahaan, dan dengan pelatihan, meningkat secara bertahap sebesar 25% hingga 75% di tahun-tahun berikutnya.

16. Strategi Pengurangan Kemiskinan untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Ekonomi Myanmar

- a. **Mengukur Tingkat Kemiskinan Myanmar.** Tingkat kemiskinan Myanmar didasarkan pada kondisi kehidupan rumah tangga yang terintegrasi - IHLCA oleh pemerintah Uni dan UNDP pada 2004-2005. UNDP awalnya

mengukur tingkat kemiskinan Myanmar berdasarkan pengeluaran konsumsi yang dikumpulkan pada 2004-2005. Dengan melakukan itu, daftar sensus terbaru mungkin tidak akurat. Oleh karena itu, data digunakan dari beberapa estimasi. IHLCA-I dihitung berdasarkan 38.816.180 orang dari 7.455.076 rumah tangga.

UNDP menghitung garis kemiskinan Myanmar dengan metode serupa pada 2009-2010. IHLCA-II dikumpulkan pada 2009-2010 membuat beberapa amandemen tentang IHLCA-I. IHLCA-II dihitung berdasarkan 41.231.764 populasi dari 8.227.043 rumah tangga. Dalam metode ini, kalori untuk nutrisi ditetapkan sebesar 2.300. Penghasilan sepanjang tahun di garis kemiskinan 2009-2010 adalah 376,151 kyat. Garis malnutrisi adalah 274.990 kyat. Sebagai contoh, jika sebuah rumah tangga dengan lima anggota keluarga tidak dapat menggunakan sekitar 150.000 kyat termasuk 1,146 kyat untuk bahan makanan pokok per bulan, rumah tangga tersebut didefinisikan sebagai keluarga miskin. Menurut pengukuran dengan cara-cara ini, persentase kemiskinan sebesar 32,1 persen pada 2004-2005, 25,6 persen pada 2009-2010 dan 19,4 persen pada 2015.¹⁵

Bank Dunia, yang memperkirakan tingkat kemiskinan berdasarkan standar sosial pada 2009-2010 sebagai langkah kedua, menggambarkan tingkat kemiskinan adalah 37,5 persen pada tahun 2014. Menurut perhitungan dengan metode Bank Dunia, tingkat kemiskinan negara adalah 44,5 persen pada 2004-2005, 37,5 persen pada 2009-2010 dan 26,1 persen pada 2015.

Tiga perbedaan teknis utama ditemukan ketika mempelajari perbedaan perhitungan UNDP dan Bank Dunia. Yang pertama adalah bahwa UNDP membuat perhitungan berdasarkan tingkat konsumsi orang miskin pada 2004-2005 sementara Bank Dunia dihitung berdasarkan tingkat konsumsi pada 2009-2010. Yang kedua adalah perbedaan dalam jumlah kerabat

¹⁵<https://www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/library/poverty/technical-report-ihlca-i.html>

dewasa. Yang ketiga adalah perbedaan dalam item makanan. Kebijakan dan Metode untuk Mengurangi Kemiskinan.

- b. **Kebijakan Mengurangi Kemiskinan.** Para ekonom berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara diperlukan untuk mengurangi jumlah orang miskin. Namun, pendapatan masyarakat miskin perlu meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat di beberapa negara, tidak ada peningkatan pendapatan kaum miskin. Penghasilan orang kaya semakin meningkat. Pada saat itu, amandemen kebijakan perlu dilakukan untuk memfokuskan pertumbuhan ekonomi untuk pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin. Berkenaan dengan pengentasan kemiskinan, Bank Dunia menggambarkan ketiga sektor tersebut sebagai berikut :

- 1) **Kebijakan untuk Peluang.** Untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan, orang miskin perlu memiliki peluang materi seperti pekerjaan, kredit, pasar, transportasi dan listrik selain akses ke pendidikan, perawatan kesehatan dan air bersih.
- 2) **Pemberdayaan.** Adanya hambatan sosial dan kelembagaan, yang kemungkinanterdapat kelemahan dalam representasi orang miskin dalam proses pembuatan kebijakannya. Pemberdayaan terdiri dari empat faktor seperti akses ke informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal. Semua institusi Negara harus bertanggung jawab pada orang miskin. Untuk memiliki akuntabilitas di suatu negara, orang miskin perlu informasi. Jika demikian, masyarakat miskin akan secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan. Dengan demikian, modal sosial akan meningkat. Bersama dengan peningkatan kapasitas sosial, institusi sosial dapat diperkuat, karena jika institusi sosial kuat maka langkah ini akan efektif pada implementasi dan rencana untuk mengurangi kemiskinan. Ini akan banyak berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

- 3) **Keamanan Pendapatan.** Orang miskin biasanya merasakan dampak yang diakibatkan oleh kurangnya kesehatan dan pendapatan daripada orang lain. Kebijakan kesehatan, lingkungan, pasar tenaga kerja dan ekonomi makro dapat mengurangi konsekuensinya. Kesulitan ekonomi dan bencana alam dapat membuat masalah bagi orang miskin dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, perlu untuk melindungi terjadinya krisis ekonomi. Selain itu, pemerintah perlu membuat persiapan untuk merespons segera ketika negara tersebut dilanda bencana alam. Dengan meletakkan rencana tingkat negara bagian, konsekuensi yang akan dihadapi orang miskin dapat dikurangi.

Cara Mengurangi Kemiskinan ada banyak cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan suatu negara dengan berbagai upaya masing-masing pemerintah, upaya kerja sama organisasi masyarakat sipil lokal, kontribusi pemerintah asing, dukungan organisasi internasional dan begitu seterusnya. Dalam arahan OECD / DAC (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan / Komite Bantuan Pembangunan) kemiskinan adalah kurangnya lima faktor. Lima faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **Kemampuan Ekonomi.** pendapatan, pengeluaran uang, kepemilikan.
- b) **Kemampuan Manusia.** kesehatan, pendidikan, gizi, ketersediaan air bersih, lingkungan bersih.
- c) **Kemampuan Politik.** masyarakat manusia, partisipasi dalam politik, pemungutan suara.
- d) **Kemampuan Sosial dan Budaya.** Berdiri sebagai manusia yang berharga dalam masyarakat manusia.
- e) **Kemampuan Perlindungan.** Perlindungan dari infeksi penyakit, kekurangan makanan, krisis dan serangan teror.

Merujuk pada faktor-faktor di atas, maka pengentasan kemiskinan perlu dilakukan dari berbagai sudut pandang. Misalnya, dalam melaksanakan pengembangan pertanian, pemerintah harus berusaha memastikan pengembangan pasar dan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan selain pengembangan produksi pertanian.

Melalui upaya untuk mengurangi pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan dapat secara otomatis menyelesaikan masalah migrasi dan kemunduran kota. Apalagi itu bisa berkontribusi banyak bagi perkembangan ekonomi negara. Pembangunan pedesaan dapat memberikan dukungan bagi pembangunan daerah dan pembangunan pertanian.

Myanmar telah menetapkan langkah untuk percepatan sektoral hingga jauh di atas tingkat pendapatan menengah pada tahun 2030. Strategi tentang Rencana Pembangunan Komprehensif Nasional 20 Rencana Strategis termasuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan. Ini akan menyediakan 1 juta pekerjaan di sektor non-pertanian pada tahun 2030; Untuk meningkatkan partisipasi 100% dalam pendidikan dasar; 50% dari tenaga kerja akan ditransfer ke sektor industri dan jasa; Dengan demikian anak-anak yang lahir dalam 1000 untuk mengurangi angka kematian bayi di bawah 50 Untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sektor non-pertanian, dan layanan dasar seperti air bersih dan listrik.

Visi pendidikan di Myanmar adalah menciptakan sistem pendidikan yang akan menciptakan komunitas belajar yang akan menghadapi tantangan era pendidikan saat ini. Pendidikan harus mengurangi kemiskinan dan menyamakan kedudukan; Meningkatkan pendapatan keluarga; Mempromosikan kesehatan individu dan

keluarga; Memperkuat masyarakat sipil; memainkan peran kunci dalam mempromosikan perdamaian dan pembangunan ekonomi.

Kementerian Pendidikan telah memberlakukan UU Pendidikan Nasional yang mengamandemen UU Pendidikan Nasional 2015 untuk memperkuat aturan dasar pendidikan nasional. Mengakui hak atas pendidikan dasar dan pendidikan dasar wajib gratis; Penyediaan sistem jaminan kualitas pendidikan; Periode pendidikan dasar diperpanjang hingga 13 tahun (setelah taman kanak-kanak) dengan total 12 tahun. Akibatnya, periode pendidikan dasar Myanmar sepenuhnya selaras dengan pendidikan dasar Negara-negara Anggota ASEAN.

Untuk mencapai sistem pendidikan nasional yang berkualitas, Pemerintah Myanmar menerapkan Rencana Strategis Nasional (2016-2021). Kurikulum sedang diperbarui dan didukung oleh pengetahuan dan keterampilan abad ke-21. Anak-anak penyandang cacat yang memiliki kesempatan belajar terbatas; Anak-anak miskin; Program pendidikan untuk anak-anak dari daerah terpencil; Teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi kaum muda yang memiliki kesempatan kerja lebih sedikit. Kami menyediakan pendidikan dan pelatihan kejuruan.

Pemerintah harus mempromosikan pendidikan, hak asasi manusia, dan hak asasi manusia dalam mempromosikan kebijakan yang berpusat pada manusia untuk pengembangan sumber daya manusia.

Peningkatan pengajaran dan pembelajaran di sekolah, yang merupakan tujuan dari Rencana Strategis Pendidikan Nasional untuk pengentasan kemiskinan Myanmar sebagai tujuan kebijakan pemerintah untuk pengurangan kemiskinan di Myanmar. Dalam mengembangkan inovasi, ada sembilan perubahan strategis pendidikan nasional yang sedang dilaksanakan untuk

pengembangan sumber daya manusia di Myanmar, dengan pelatihan kejuruan yang diselenggarakan oleh kementerian dan fokus pada pengembangan sumber daya manusia.

Diharapkan bahwa pembangunan berkelanjutan dan pelatihan untuk akses yang sama terhadap kesehatan dan kewarganegaraan akan dicapai melalui perencanaan sistematis dan implementasi pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan guna pengentasan kemiskinan.

c. **Kebijakan untuk Mengentaskan Kemiskinan di Wilayah Perkotaan.**

Pengembangan wilayah perkotaan penting untuk pembangunan suatu negara. Untuk pengembangan daerah perkotaan, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat miskin perlu melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan di daerah perkotaan serta Negara perlu menetapkan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan perkotaan secara efektif. Faktor-faktor yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan di daerah perkotaan adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Kemunculan usaha kecil.
- 2) Pengembangan peluang kerja.
- 3) Implementasi sektor pertanian perkotaan.
- 4) Pengembangan industri rumahan.
- 5) Penyediaan peluang jaminan sosial.
- 6) Pembangunan kota satelit baru.
- 7) Pemerintahan sipil yang baik.
- 8) Perlindungan untuk keamanan manusia.

d. **Pengentasan Kemiskinan di Daerah Pedesaan.** Selain pengurangan kemiskinan di daerah perkotaan, pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan juga penting di negara-negara berkembang seperti di

¹⁶ <https://myanmar.gov.mm/en/ministry-of-planning-finance>

Myanmar. Definisi daerah pedesaan adalah tempat-tempat di luar daerah perkotaan di mana kepadatan penduduk rendah dan orang-orang mencari nafkah tergantung pada sektor pertanian dan kehutanan. Tempat-tempat yang bukan daerah perkotaan disebut daerah pedesaan, dimana sebagian besar orang di daerah pedesaan adalah petani, mereka yang mengoperasikan industri pembibitan dan industri air dan minoritas etnis. Karena mereka tidak memiliki pendidikan standar, pengetahuan, informasi pasar dan infrastruktur yang memuaskan, mereka lemah dalam pendapatan, produksi, dan perkembangan sosial ekonomi. Dari mereka, beberapa menghadapi situasi kelaparan, kurangnya kemampuan untuk melindungi bencana alam dan infeksi penyakit. Karena itu, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat pedesaan maka pengentasan kemiskinan sangat penting bagi negara-negara berkembang.

Ketersediaan pekerjaan penting dalam pengembangan sektor pertanian (pertumbuhan tanaman dan produksi daging, ikan dan produk-produk kehutanan) dan sektor non-pertanian (layanan pertanian, transaksi produk dan produk bernilai tambah) dalam pengentasan kemiskinan daerah pedesaan. Saat ini, sektor lahan pertanian pedesaan dan sektor non-pertanian secara terpisah ditunjuk dalam pembangunan pedesaan di seluruh dunia dan negara-negara tersebut berupaya mengembangkan kedua sektor tersebut.

Myanmar membutuhkan taktik dan kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Sebagian besar penduduk di negara ini tinggal di daerah pedesaan dan beroperasi di industri pertanian. Karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kapasitas produksi industri pertanian dan industri non-pertanian, untuk mempersempit kesenjangan pendapatan antara orang miskin dan orang kaya, untuk memperluas pembangunan ekonomi dan untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan dan peluang ekonomi. Dengan mempelajari upaya beberapa negara Asia untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah dapat mengetahui taktik dan kebijakan yang berguna untuk Myanmar.

e. **Pembangunan Pedesaan di Myanmar.** Sekilas tentang Kondisi Sosial Ekonomi Myanmar bahwa Menurut Sensus Penduduk 2020, Myanmar memiliki populasi 54,42 juta dengan tingkat pertumbuhan 1,05% per tahun. Di antara total populasi, hanya 32,6% yang tinggal di daerah perkotaan dengan total tenaga kerja 33,41 juta. Sisanya, hampir 70% dari total populasi berada di daerah pedesaan dan mayoritas dari mereka terlibat dalam pertanian. Sektor pertanian memberikan kontribusi 40,7% dari total PDB dan 25,6% dari total ekspor Myanmar.¹⁷

Di daerah pedesaan, 66,4% dari populasi pedesaan adalah tenaga kerja dan di antara mereka, 36,4% terlibat terutama dalam pertanian, peternakan dan bisnis sendiri sementara 18,7% menjalankan bisnis keluarga mereka dan 18,6% di sektor informal. Sebaliknya, 59,3% populasi perkotaan adalah tenaga kerja dan di antara mereka, 34,9% menjalankan bisnis mereka sendiri.

Antara tahun 1998 dan 2011, beberapa proyek pembangunan pedesaan telah dimulai tetapi mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan masih rendah karena kurangnya transparansi dan data serta informasi statistik yang lemah. Pada tahun 2011, pemerintah sipil terpilih memulai reformasi politik dan ekonomi bersama dengan program pengurangan kemiskinan. Menurut penelitian pada tahun 2011, 3,7% dari total populasi mengalami pengangguran di Myanmar dan 26% dari populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, Pemerintah Myanmar memulai kolaborasi dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional dan nasional untuk memerangi kemiskinan termasuk di daerah pedesaan.

f. **Pembangunan Pedesaan Myanmar dan Pengurangan Kemiskinan.** Di Myanmar, segera setelah Pemerintah sipil yang baru terpilih pada tahun 2011, upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di semua bagian negara. Khususnya di daerah pedesaan, proyek dan program pembangunan dimulai untuk mengurangi kemiskinan pedesaan

¹⁷ <https://myanmar.gov.mm/en/ministry-of-planning-finance>

dan kesenjangan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan di Myanmar. Dengan mengurangi kemiskinan pedesaan, dapat meningkatkan pendapatan, mata pencaharian dan memberdayakan masyarakat pedesaan serta untuk mencapai pembangunan ekonomi Myanmar secara keseluruhan. Sejak Mei 2011, dirancang delapan tugas utama untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi penduduk pedesaan dan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tugas-tugas ini adalah:

- 1) Pengembangan Produksi Pertanian.
- 2) Pengembangan Produksi Ternak dan Perikanan.
- 3) Pengembangan Industri Kecil di Pedesaan.
- 4) Pengembangan Asosiasi Simpan Pinjam Skala Kecil.
- 5) Pengembangan Organisasi Koperasi Pedesaan.
- 6) Pengembangan Elektrifikasi Pedesaan dan Sumber Daya Energi.
- 7) Perlindungan dan Konservasi Lingkungan dan.
- 8) Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Statistik.¹⁸

g. **Kerangka Kerja untuk Pembangunan Pedesaan.** Menurut Survei Pengeluaran Rumah Tangga PBB untuk Program Pembangunan PBB (UNDP) 2010, rasio kemiskinan Myanmar telah diperiksa dan penekanan telah dilakukan untuk meningkatkan pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan. Untuk mengurangi kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita dan kondisi sosial ekonomi sangat diperlukan dan kebijakan pembangunan pedesaan yang tepat diperlukan untuk Myanmar pada waktu itu. Akibatnya, Myanmar menetapkan kebijakan pembangunan pedesaannya sebagai: "Mengakses sebanyak mungkin bantuan teknologi, keterampilan, investasi dan pembangunan dari tingkat lokal dan internasional, pengaturan dan implementasi proyek-proyek

¹⁸<https://myanmar.gov.mm/en/ministry-of-planning-finance>

pembangunan pedesaan berbasis masyarakat secara tepat waktu untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi dan upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan sesaat bersama dengan komunitas pembangunan proyek pembangunan pedesaan yang digerakkan ”

Pada bulan Agustus 2013, Kementerian Peternakan dan Perikanan telah diganti namanya menjadi “Kementerian Peternakan, Perikanan, dan Pembangunan Pedesaan”. Di bawah Kementerian baru, Departemen Pembangunan Pedesaan diluncurkan dengan cabang-cabang yang mencakup bidang upaya pembangunan pedesaan. Pada 2013, upaya pembangunan pedesaan yang komprehensif telah dimulai dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan afiliasinya, mitra pembangunan Myanmar, pakar, dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan menetapkan strategi sebagai berikut:

- 1) **Penentuan Skala Prioritas.** Untuk mencapai pembangunan pedesaan, pengaturan prioritas dibuat untuk mengakses sumber daya tenaga kerja, keuangan, dan fisik yang tersedia secara efektif.
- 2) **Mengintegrasikan dengan Upaya Pembangunan lainnya.** Di Myanmar, upaya pembangunan pedesaan diperlukan untuk menerapkan program jangka panjang sehingga kolaborasi dengan masing-masing Kementerian, donor lokal dan internasional, CSO lokal dan pemangku kepentingan swasta akan ditingkatkan.
- 3) **Menetapkan Prosedur Tata Kelola yang Baik.** Karena upaya pembangunan pedesaan bersifat jangka panjang maka upaya diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di masa depan dengan demikian, pengaturan praktik tata kelola yang baik sangat diperlukan.
- 4) **Akses ke Sumber Daya Keuangan Berkelanjutan.** Untuk melaksanakan upaya pembangunan pedesaan, maka penting untuk mengatur dana berkelanjutan melalui pendapatan pajak.

- 5) **Mewujudkan Implementasi yang Efektif.** Implementasi program dan proyek pembangunan pedesaan membutuhkan upaya kolaboratif dan terintegrasi dengan pemangku kepentingan yang berbeda daripada hanya dilaksanakan oleh pemerintah nasional.

Dengan demikian untuk mengimplementasikan kerangka kerja konseptual, upaya yang telah dilakukan untuk memulai dan mengimplementasikan Proyek Pengembangan Pedesaan Mya SeinYaung, adalah Proyek Pengembangan Berbasis Masyarakat (CDD), terdiri atas proyek pembangunan kapasitas, proyek penghidupan dan pendapatan, dan sebagainya. Untuk mencapai upaya ini, Pemerintah bekerja sama erat dengan organisasi mitra, pemangku kepentingan dari afiliasi PBB, LSM dan LSM internasional, CSO.

17. **Upaya Pengentasan Kemiskinan di Myanmar**

Kementerian Perencanaan Nasional dan Pembangunan Ekonomi melakukan pengumpulan data untuk Penilaian Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Terpadu Myanmar 2009-2010. Menurut survei terpadu, 25 persen populasi Myanmar hidup di bawah garis kemiskinan. Survei menemukan bahwa kemiskinan pedesaan dua kali lipat dari perkotaan, dengan 29 persen penduduk miskin berada di daerah pedesaan sedangkan 15 persen di perkotaan. Di antara wilayah dan negara bagian, Negara Bagian Chin adalah yang termiskin dengan tingkat kemiskinan tertinggi 73 persen diikuti oleh Negara Bagian Rakhine dengan 44 persen, Wilayah Taninthayi dengan 33 persen, Negara Bagian Shan dengan 33 persen dan Wilayah Ayeyawady dengan 32 persen. Wilayah Ayeyawady adalah 19 persen dengan tingkat gizi di bawah tertinggi, diikuti oleh 15 persen di Wilayah Mandalay, 12 persen di Negara Bagian Rakhine dan 11 persen di Negara Bagian Shan.¹⁹

Fakta penting di Myanmar adalah bahwa peristiwa kemiskinan sementara ditemukan dalam pengumpulan data. Karena proporsi rumah tangga yang jatuh ke

¹⁹“Studi Komprehensif tentang Standar Hidup Rumah Tangga di Myanmar (2009-2010)”; 2011 Juni Kementerian Perencanaan dan Keuangan Myanmar

dalam kemiskinan adalah 11: 3 persen sementara proporsi rumah tangga yang keluar dari kemiskinan adalah 16,5 persen, pemahaman mereka tentang penyebab tenggelam ke dalam kemiskinan dan keluar dari kemiskinan menjadi lemah, sehingga berkontribusi terhadap ketidakakuratan data²⁰.

Perubahan sifat kemiskinan terkait dengan status kemiskinan setiap rumah tangga dari waktu ke waktu. Terutama, ditemukan bahwa proporsi mereka yang sementara miskin adalah 28 persen dari populasi yang hidup dalam kemiskinan sesuai dengan studi tentang kemiskinan kronis, kemiskinan sementara (keluar dari kemiskinan atau transisi dari jatuh ke dalam kemiskinan) dan keluarga yang tidak miskin. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Perspektif Pengentasan Kemiskinan. Ditemukan bahwa pemerintah baru menerapkan skema pengentasan kemiskinan bekerja sama dengan organisasi lokal dan internasional selama masa pemerintahannya. Seminar dan forum ekonomi nasional dan global diadakan untuk pengembangan ekonomi negara. Presiden menghadiri lokakarya tentang pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan dan memberikan panduan tentang perumusan dan implementasi rencana strategis. Dalam melaksanakan program kerja, komite kerja, komite pendukung dan komite implementasi dibentuk di berbagai tingkatan di daerah, negara bagian dan Wilayah Dewan Nay Pyi Taw, dan pekerjaan dilaksanakan secara terpisah oleh kotapraja (kelompok kota) dan desa (kelompok desa).

b. Program Pembangunan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. Salah satu poin penting untuk mengentaskan kemiskinan adalah memastikan pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dan peluang bagi masyarakat. Mengambil pelajaran dari negara-negara tetangga yang mencapai pertumbuhan cepat dalam dua dekade terakhir, pemerintah Myanmar mengembangkan Rencana Pengembangan Komprehensif Nasional sebagai rencana strategis 20 tahun yang menekankan pentingnya Yangon dan Mandalay sebagai kutub

²⁰Survei Komprehensif Rumah Tangga di Myanmar (2009-2010)"2011 juni ,Kementerian perencanaan dan Keuangan

pertumbuhan dan integrasi perusahaan ekonomi dengan tujuan memfasilitasi partisipasi Myanmar dalam jaringan produksi regional dan rantai pasokan global melalui strategi pertumbuhan yang berorientasi ekspor.

Rencana nasional lima tahun pertama (dari TA 2011-2012 hingga 2015-2016 TA) dirumuskan dan diimplementasikan. Berdasarkan konsep pembangunan yang berpusat pada manusia untuk memastikan pembangunan sosial-ekonomi, rencana lima tahun dilakukan dengan tujuan meningkatkan sektor pertanian negara untuk kemunculan negara industri, memastikan pembangunan komprehensif di berbagai sektor dan pembangunan yang adil di daerah dan negara bagian, pertemuan menetapkan standar dalam statistik dan fakta serta angka, mempersempit kesenjangan kaya-miskin, meningkatkan standar hidup rakyat dan memastikan munculnya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Karena mengakhiri konflik bersenjata yang lahir bersama dengan kemerdekaan negara itu sangat penting bagi perkembangan ekonomi Myanmar, Komite Pembuat Perdamaian Union dibentuk, dan Perjanjian Gencatan Senjata Nasional ditandatangani antara pemerintah dan delapan kelompok bersenjata pada 15 Oktober 2015.

Untuk memberi manfaat langsung kepada seluruh masyarakat, tujuh program kerja yang mencakup listrik, air minum, pengembangan sektor pertanian, pekerjaan, pariwisata, keuangan mikro dan perdagangan dan investasi diprioritaskan untuk diterapkan. Untuk memastikan pengembangan sektor peternakan dan perikanan dan peningkatan konsumsi susu dan telur per orang, program kerja pengembangan ternak dan perikanan dilakukan di wilayah dan negara bagian. Selama tahun fiskal 2015-2016, distribusi bahan pakan dan obat-obatan ternak ke daerah-daerah yang dilanda bencana, implementasi proyek hijau zamrud untuk desa-desa, distribusi sapi perah untuk Program Susu Sekolah dan distribusi bebek, ayam, babi, domba dan kambing ke masyarakat setempat dilakukan dengan anggaran sebesar K 3.900 juta.

Sebagai Strategi Nasional Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan di Myanmar, delapan program kerja untuk pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan telah ditetapkan dan diimplementasikan:

- 1) Untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian.
- 2) Untuk mempromosikan sektor peternakan dan perikanan.
- 3) Untuk meningkatkan produktivitas bisnis pedesaan.
- 4) Mengembangkan bisnis keuangan mikro.
- 5) Mengembangkan kegiatan sindikat koperasi desa.
- 6) Mengembangkan status sosial ekonomi di daerah pedesaan.
- 7) Untuk mempromosikan akses energi di daerah pedesaan.
- 8) Untuk melakukan konservasi dan perlindungan lingkungan.

Pinjaman ODA 17 miliar yen dari Jepang, bantuan senilai US \$ 80 juta oleh Proyek Bank Kerja untuk Pembangunan Berbasis Masyarakat (CDD), pinjaman 20 juta euro dari Italia untuk memperluas proyek, bantuan untuk nilai 100 juta euro dari Jerman untuk pembangunan pedesaan, pinjaman modal K 308 miliar oleh Kementerian Koperasi bekerja sama dengan INGO, K 130 miliar digunakan untuk menjual mesin pertanian dan peralatan perikanan saat pembelian, bantuan untuk pembentukan 100 desa model Saemaul Umdong oleh Republik Korea dan anggaran Uni untuk proyek desa hijau zamrud dihabiskan untuk pelaksanaan delapan program kerja. Ditemukan bahwa pemerintah menekankan pada kerja sama dengan para pemangku kepentingan pembangunan dan pemain utama di sektor swasta, masyarakat, LSM dan LSM internasional.

18. **Strategi untuk Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Myanmar**

Negara-negara dunia berusaha untuk mempersempit kesenjangan kaya-miskin yang menyebabkan masalah sosial seperti tingkat kejahatan yang tinggi, kematian bayi yang tinggi dan kehamilan remaja di negara-negara di mana kesenjangan itu melebar antara kaya dan miskin. Menurut Penilaian Hidup Rumah

Tangga Terpadu Myanmar 2009-2010, koefisien Gini, baik ketidaksetaraan komparatif dan ketidaksetaraan lengkap yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketidaksetaraan, ditemukan sangat rendah selama periode 2005-2010²¹. Dalam perbandingan antara masing-masing 20 persen orang terkaya dan termiskin sebagai ukuran untuk indeks ketimpangan lengkap, kesenjangan telah menyempit, baik untuk tahun 2005 dan 2010, karena pengeluaran konsumsi untuk 20 persen termiskin adalah 4 persen lebih tinggi dibandingkan dengan yang terkaya 20 persen. Dalam menganalisis pangsa konsumsi 20 persen termiskin sebagai ukuran untuk ketidaksetaraan komparatif, ada sedikit penurunan di dalamnya karena pangsa konsumsi termiskin telah meningkat dari 11,1 persen pada 2005 menjadi 12,0 persen pada 2010 (Tabel- 4) (Tabel-5).

a- Pembangunan Ekonomi dan Langkah-Langkah untuk Mengurangi Ketimpangan Pendapatan.

Penciptaan peluang kerja di wilayah dan negara masing-masing melalui pembangunan ekonomi sangat penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Pemerintah melakukan langkah-langkah yang diperlukan tidak hanya untuk mewujudkan kesetaraan dalam distribusi pendapatan melalui penerapan skema pengentasan kemiskinan dalam strategi nasional untuk pembangunan komprehensif tetapi juga untuk memastikan administrasi urusan publik dan pengembangan sektor industri. Hanya ketika munculnya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, penggunaan pendapatan dan pengeluaran publik akan transparan dan efektif. Jadi, pemerintah mengizinkan sistem diskusi kolektif untuk memastikan pembangunan partisipatif dengan partisipasi kolektif dari organisasi sosial, komite pendukung pembangunan, komite manajemen kota, warga kota dan perwakilan etnis minoritas, memperkuat tata kelola lokal dan menekankan desentralisasi.

Pembentukan komite manajemen dan mekanisme untuk bantuan internasional, pengawasan, pemberlakuan undang-undang anti-korupsi, kebebasan media dan langkah-langkah tender terbuka adalah di antara

²¹Survei Komprehensif Rumah Tangga di Myanmar (2009-2010)"2011 juni ,Kementerian perencanaan dan Keuangan

reformasi yang dibuat oleh pemerintah²². Meskipun pemerintah berhasil mewujudkan tujuan pengembangan industrinya untuk TA 2011-2012 dan TA 2012-2013, tujuan mengubah sektor industri tidak memenuhi keberhasilan TA 2013-2014 dan TA 2014-2015. Komite pengembangan usaha kecil dan menengah dan komite kerja dibentuk dan langkah-langkah dilakukan untuk mengembangkan UKM yang dibutuhkan untuk pendapatan generasi dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah mengizinkan kepemilikan swasta di berbagai bidang ekonomi sesuai dengan sistem ekonomi pasar, membuka jalan untuk meningkatkan investasi swasta. Terutama, peluang yang baik untuk investasi lebih banyak di sektor swasta dibuat setelah diberlakukannya Undang-Undang Investasi Asing dan Undang-Undang Investasi Warga. Sebagai sistem perpajakan yang lebih baik memainkan peran penting dalam realisasi distribusi pendapatan, pencabutan dan amandemen undang-undang yang ketinggalan jaman dan diundangkannya undang-undang baru undang-undang termasuk Undang-Undang Perpajakan Serikat 2014 dilaksanakan. Sebanyak 12 undang-undang dicabut atau diubah. Undang-undang yang mencabut Undang-Undang Pajak Penghasilan, UU yang mengubah UU Cap, UU yang mengubah UU Pajak Penghasilan, UU yang mengubah UU Pajak Kantor dan UU yang mengubah UU Pajak Komersial adalah beberapa di antara undang-undang tersebut.

Dengan efektivitas sistem perpajakan, telah terjadi peningkatan pendapatan pemerintah dari 1,69 triliun untuk TA 2011-2012 menjadi 5,9 triliun untuk TA 2015-2016. Bagian pendapatan pemerintah dalam PDB adalah 8 persen untuk TA 2015-2016, dibandingkan dengan 3 persen untuk TA 2011-2012. Pengaturan sedang dilakukan untuk memperluas basis pajak, mulai mengumpulkan Pajak Pertambahan Nilai-PPN, meningkatkan kapasitas perpajakan, menginstal lebih banyak Jaringan ATM, menjual obligasi pemerintah dan obligasi treasuri dengan penawaran kompetitif dan

²²Rencana pengembangan Komprehensif Nasional Kementerian Perencanaan Nasional dan Pembangunan Ekonomi, 2015

menetapkan Pajak Komersial Khusus (SCT) selama rencana lima tahun kedua. Karena keuangan mikro sangat efektif untuk menerapkan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, membuat undang-undang terkait keuangan mikro dan pembentukan komite dilakukan. Lebih dari 200 lisensi dikeluarkan untuk lembaga keuangan mikro milik swasta, sehingga berkontribusi terhadap perbaikan standar kehidupan masyarakat awam dengan bantuan pinjaman keuangan mikro.

19. **Pengurangan Pengangguran di Myanmar.**

Menurut Sensus Myanmar 2014, jumlah total pekerja berusia 10 tahun ke atas adalah 40.988.693. Dari mereka, populasi aktif dalam angkatan kerja adalah 23.456.054. Populasi yang tidak aktif dalam angkatan kerja adalah 17.532.639. Populasi pengangguran adalah 954.506 dan populasi yang dipekerjakan adalah 22.501.548. Dari populasi yang tidak aktif, jumlah mereka yang tidak mencari pekerjaan adalah 172.514, jumlah siswa penuh waktu adalah 5.641.374, jumlah mereka yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga adalah 7.501.642, jumlah narapidana, pensiunan dan usia adalah 2.334.398, jumlah orang sakit dan orang cacat adalah 312.879 dan jumlah orang lain adalah 1.569.832.

Pekerjaan utama adalah manajer, profesional, teknisi, pekerja pendukung administrasi, pekerja layanan dan penjualan, pekerja pertanian terampil, kehutanan dan perikanan, pekerja kerajinan dan perdagangan terkait, operator mesin dan perakitan dan pekerja umum. Negara Chin memiliki jumlah tertinggi dari mereka yang bekerja di bidang pertanian. Sebagai status pekerjaan, proporsi populasi dalam angkatan kerja di antara mereka yang berusia antara 15 dan 64 tahun adalah 67,3 persen, tingkat pengangguran adalah 3,9 persen dan rasio pekerjaan-ke-populasi adalah 64,6 persen. Tingkat pengangguran tertinggi di Negara Bagian Rakhine (10,4 persen) dan Kayin (7,5 persen). Proporsi populasi pengangguran muda di antara mereka yang berusia antara 20 dan 24 adalah 8,6 persen dan mereka yang berusia antara 25 dan 29 adalah 4,8 persen. Proporsi anak-anak yang bekerja yang berusia antara 10 dan 17 menurut wilayah / negara bagian adalah 23,1 persen, dan Negara Bagian Shan memiliki jumlah anak yang bekerja paling tinggi dengan 31,6

persen. Penciptaan peluang kerja adalah prasyarat penting untuk memiliki kondisi yang sehat. Penciptaan lapangan kerja berarti pengurangan pengangguran. Kekayaan suatu bangsa terdiri dari perdagangan yang lancar, kelimpahan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perkembangan negara juga berasal dari arus masuk investasi asing. Sanksi ekonomi terhadap Myanmar yang diberlakukan oleh AS dan UE sejak 2003 mengakibatkan ditutupnya pabrik-pabrik garmen yang merupakan sumber ekspor dan penurunan ekonomi yang menyebabkan tingginya angka pengangguran. Setelah mencabut beberapa sanksi ekonomi untuk memperingati kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Myanmar pada November 2012 di masa pemerintahan demokratis yang baru, bisnis impor dan ekspor meningkat dan tingkat pengangguran menurun.

Karena 70 persen populasi Myanmar tinggal di daerah pedesaan, langkah-langkah untuk pengembangan UKM dimasukkan dalam rencana lima tahun pertama (dari 2011-2012 TA hingga 2015-2016 TA) untuk menciptakan peluang kerja di daerah pedesaan, Myanmar memprakarsai empat reformasi pada bidang investasi dan sektor swasta untuk memastikan lingkungan yang sehat dalam berinvestasi di Myanmar dan untuk mengembangkan sektor swasta negara itu maka dilakukan beberapa langkah penting :

- 1) Regulasi Investasi Asing dan anggaran rumah tangga serta Undang-Undang Investasi Warga Negara telah diamandemen dan diberlakukan. Undang-undang Zona Ekonomi Khusus dan peraturannya diamandemen dan diumumkan untuk menarik lebih banyak investasi. Hukum Investasi Asing digabungkan dengan Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Investasi Myanmar diberlakukan pada tahun 2016.
- 2) Mengenai investasi, pembatasan lebih fleksibel dan reformasi kebijakan untuk transparansi dilakukan.
- 3) Layanan Satu Atap didirikan untuk memungkinkan investor mendapatkan semua persetujuan pendaftaran yang diperlukan dengan melakukan persyaratan yang dilakukan di satu tempat.

- 4) Untuk menilai proposal investasi secara efektif dan untuk membuat keputusan kebijakan, Komisi Investasi Myanmar direformasi dan dibentuk kembali dengan pejabat dari departemen pemerintah, pakar dan perwakilan dari sektor swasta.

Selanjutnya untuk menambah peluang terciptanya lapangan kerja, Pusat Pengembangan UKM didirikan untuk penyediaan bantuan keuangan bagi usaha kecil dan menengah dan Bank Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (SMIDB) dibuka setelah menerima pinjaman teknis. Selain itu, pekerjaan telah dilakukan untuk memastikan munculnya UKM yang sukses, transformasi dari UKM menjadi industri dan penyediaan bantuan dan meningkatkan kemitraan publik-swasta dalam manajemen listrik dan energi di bandara dan bisnis penerbangan. Pada Rencana 20 tahun (Rencana Pembangunan Komprehensif Nasional - dari 2011-2012 TA hingga 2030-2031 TA) yang dibagi menjadi empat rencana lima tahun memiliki tahapan sebagai berikut:

- a) Pembangunan Pedesaan dan Pengurangan Kemiskinan (hal-hal yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran secara cepat).
- b) Memperkuat basis ekonomi dan investasi, terutama langkah-langkah kunci untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.
- c) Memperkuat konektivitas domestik dan internasional.
- d) Memastikan kemunculan negara modern dan maju dengan ekonomi berpenghasilan menengah ke atas pada 2030-2031 untuk diintegrasikan ke dalam komunitas global.

20. **Hasil Analisis.** Dalam pembahasan pada Bab III, dapat dirumuskan hasil analisis sebagai berikut :

a. Penyebab kemiskinan di negara myanmar sangatlah kompleks

Mulai dari persoalan politik, ekonomi dan juga sejarah konflik yang sampai sekarang masih membelenggu Myanmar. Dari uraian di atas faktor-faktor yang paling dominan terutama adalah masih rendahnya pendidikan, persoalan kesehatan dan persoalan politik dan keamanan dalam negeri,

khususnya yang melibatkan kelompok etnik bersenjata. Kondisi inilah yang sangat mempengaruhi pembangunan nasional sebagaimana yang dimaksudkan oleh Chamber, dimana dalam pembangunan Nasional sangatlah diperlukan kestabilan. Untuk itulah Myanmar dari waktu ke waktu berusaha memperbaiki stabilitas keamanan negaranya agar pembangunan dapat dilakukan. Jejak ini dapat kita lihat dari catatan pertumbuhan ekonomi maupun statistik kemiskinan di negara Myanmar. Dimana apabila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, penurunan angka kemiskinan di Myanmar sudah cukup signifikan.

Pengangguran diperkirakan akan bertambah pada tahun 2020, sebagai dampak anjloknya ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19. Meski Negara Myanmar adalah negara yang jumlah penyebaran Covid-19 relatif kecil namun pertumbuhan ekonomi global yang terguncang juga turut mengganggu pertumbuhan ekonomi Myanmar, khususnya pada sektor yang berkaitan langsung dengan investasi dan pasar internasional. Pengangguran juga terutama karena tingkat pendidikan yang rendah di Myanmar.

b. Peningkatan Standar kehidupan Masyarakat Mengacu Pada Teori Pembangunan Ekonomi.

Komite pengembangan usaha kecil dan menengah dan komite kerja dibentuk dan langkah-langkah dilakukan untuk mengembangkan UKM yang dibutuhkan untuk pendapatan generasi dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah juga mengizinkan kepemilikan swasta di berbagai bidang ekonomi sesuai dengan sistem ekonomi pasar, membuka jalan untuk meningkatkan investasi swasta.

Karena keuangan mikro sangat efektif untuk menerapkan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, membuat undang-undang terkait keuangan mikro dan pembentukan komite dilakukan. Lebih dari 200 lisensi dikeluarkan untuk lembaga keuangan mikro milik swasta, sehingga

berkontribusi terhadap perbaikan standar kehidupan masyarakat awam dengan bantuan pinjaman keuangan mikro.

c. Perspektif pengentasan kemiskinan yang merujuk pada definisi Kemiskinan oleh PBB

Yaitu dimana kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan memiliki pilihan dan peluang, pelanggaran martabat manusia. Maka selain menjaga kestabilan politik dan keamanan dalam negeri, maka Pemerintah Myanmar harus menyelesaikan beberapa persoalan dasar yang menyangkut peningkatan sumber daya manusia. Antara lain dengan membenahi sistem pendidikan nasional yang memiliki daya saing tetapi berorientasi pada potensi masing-masing daerah yang cukup beragam. Dimana kalau dilihat dari data statistik yang ada penduduk Myanmar terkonsentrasi di desa-desa sekitar 70%. Maka akses anak-anak desa terhadap pendidikan, terutama yang berhubungan dengan keterampilan teknis perlu ditingkatkan. Dengan demikian jumlah angkatan kerja negara Myanmar yang mencapai 67,3% dapat berpartisipasi secara efektif dalam berbagai bidang ekonomi di negara tersebut, Sehingga kemiskinan yang digambarkan oleh PBB tersebut dapat segera diselesaikan, termasuk terkait dengan ketimpangan pendapatan.



BAB IV

PENUTUP

21. Simpulan

- a. Saat ini, ekonomi Myanmar telah tertinggal dari ekonomi global selama setengah abad, sekitar seperlima penduduk negara itu hidup dalam kemiskinan, kebanyakan orang miskin tinggal di pedesaan. Oleh karena itu kini saatnya untuk fokus pada pembangunan pedesaan. Sejak 2011, Myanmar telah berupaya mengembangkan ekonomi pasar melalui transisi demokrasi.

Perjanjian pembangunan berkelanjutan setelah 2015 mencakup tujuan menangani sumber ketimpangan secara langsung untuk mengubah pendapatan dan ketimpangan serta kesempatan kerja. Negosiasi untuk memberikan indikator yang diperlukan dan untuk mengadopsi kebijakan yang sehat dapat membantu mengurangi pertumbuhan ketimpangan. Kreativitas dan inovasi warga memainkan peran kunci dalam kesuksesan negara, Pemerintahan Negara terdiri dari orang-orang yang terampil dan terpelajar. Hanya dengan menghasilkan kecerdasan dan personel yang berdaya saing, maka negara dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi. Di masa depan, anak yang berpendidikan akan menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan orang tua yang berpengalaman.

Myanmar akan bergabung dengan Komunitas Ekonomi ASEAN setelah 2015 dan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Hanya ketika Myanmar menghasilkan tenaga ahli dan pekerja terampil yang berkualitas, barulah ia memiliki kemampuan untuk berintegrasi secara komprehensif dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sumber daya manusia yang terampil akan memainkan peran penting dalam pembangunan sosial-ekonomi bangsa serta dengan cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, maka dapat ditemukan bahwa penerapan sebuah konsep untuk melaksanakan strategi utama pembangunan ekonomi harus dikelola dengan penuh

semangat dan terarah. Pengembangan potensi kekuatan bangsa dapat digunakan untuk menghasilkan banyak produksi dengan menerapkan teknologi secara efektif.

- b. Diperlukan komitmen bangsa untuk memprakarsai reformasi dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan dan skema pengurangan pengangguran tidak hanya keluar dari hasil strategi yang baik tetapi juga untuk memastikan terlaksananya pembangunan ekonomi. Dalam menerapkan skema pengentasan kemiskinan, juga diperlukan untuk mendorong kegiatan masyarakat koperasi untuk dipercaya dengan meneliti efektivitas kegiatan seperti memberikan pinjaman desa oleh organisasi petani dan menjual bahan makanan dan barang-barang rumah tangga oleh sindikat koperasi. Selain itu, sangat penting untuk mengembangkan strategi yang baik untuk pengentasan kemiskinan dan untuk mengimplementasikan usaha pengentasan kemiskinan yang bertanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi karena pengurangan ketidaksetaraan pendapatan dan tingkat pengangguran berdampak dengan perjuangan melawan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi sangat penting bagi semua warga negara, dan mereka harus berusaha untuk menjadi tugas nasional. Itu hanya akan terjadi jika semua pemangku kepentingan mulai dari warga masyarakat sampai kepada aparat pemerintahan bersama-sama ikut terlibat. Kebutuhan utama adalah untuk mewujudkan dan mengimplementasikan pendekatan pengentasan kemiskinan dan pembangunan dengan pengetahuan bahwa setiap orang berusaha untuk meningkatkan, dan bisnis perlu mengambil keuntungan dari peluang yang lebih terbuka. Negara harus terus memantau pengurangan kemiskinan, yang menghasilkan hasil nyata. Dengan mengevaluasinya, maka semua warga negara Myanmar tidak hanya dapat mencapai Tujuan Pembangunan tetapi juga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Myanmar sebagai sebuah Negara yang sedang membangun demokrasi bersamaan dengan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan, serta sedang menata kelola sistem pemerintahan melalui reformasi administrasi. Pada saat yang sama, Myanmar sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang baru terlepas dari periode tantangan politik, dibutuhkan kekuatan masyarakat madani (civil Society) ikut mengawasi perkembangan ekonomi negara ini. Karena pembangunan pedesaan dan proses pengentasan kemiskinan adalah sebuah proses panjang dan berkelanjutan, maka pembangunan pedesaan harus dilakukan terus-menerus. Semua aspek pengentasan kemiskinan harus secara konstan ditinjau dan dievaluasi serta diimplementasikan secara strategis. Hanya dengan demikian seluruh negara dapat mencapai pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial-ekonomi negara secara bersamaan, karena seluruh bangsa berusaha untuk bekerja sama dengan sudut pandang nasional.

- c. Meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat pedesaan sangat penting untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi di Myanmar. Karena sekitar 70% penduduk Myanmar tinggal di pedesaan. Selain itu, masyarakat pedesaan mengandalkan pertanian dan sektor ekonomi dasar. Sektor-sektor ini masih menyumbang sekitar 40% dari produk domestik bruto (PDB) Myanmar dan mempekerjakan 61,2%. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan tidak hanya dapat mengentaskan kemiskinan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi Myanmar di masa depan, serta pengentasan kemiskinan, yang merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan PBB pada tahun 2030.

Pengungsi masih berjuang di Myanmar setiap tahun karena ketidakstabilan politik dan konflik etnis bersenjata. Migran luar negeri juga meningkat. Buruh migran dan pekerja migran di Myanmar kehilangan pekerjaan mereka di berbagai sektor negara dan tidak dapat mendukung pembangunan ekonomi bagi para pengungsi, termasuk menyediakan

mata pencaharian bagi para migran, upah publik berkurang dan bahkan hilang. Selain itu, pekerja migran domestik dan asing tidak dapat melakukan usaha dalam perekonomian dan keterampilan yang dimiliki menghambat perkembangan ekonomi mereka.

Topik ketimpangan pendapatan dibahas secara luas di seluruh dunia, dan para siswa harus lebih berhasil dalam melaksanakan pendidikan di tingkat dasar dan menengah dalam menerapkan kebijakan pasar pendidikan dan menekankan kontrak perlindungan kerja dan menerapkan hak istimewa yang sesuai untuk perlindungan kerja di Myanmar.

Kita dapat melihat kebutuhan untuk mengelola produksi pekerja terampil yang diakui secara internasional dalam skala besar untuk mengatasi pengangguran dan memenuhi kebutuhan pekerja terampil untuk pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran menciptakan kesenjangan antara wilayah dan negara bagian, maka negara perlu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk memperkuat wilayah yang lemah melalui program pembangunan dan pengelolaan ekonomi regional.

22. Rekomendasi

Pembangunan pedesaan telah dipercepat lebih jauh dari sebelumnya di bawah pemerintahan yang terpilih secara demokratis tahun 2011. Komite Sentral Myanmar untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan Didirikan pada bulan Juni, lima strategi sedang dikembangkan; Kementerian Perikanan dan Pembangunan Pedesaan (sebelumnya) Pertanian; Kementerian Peternakan dan Irigasi (sekarang dikenal sebagai Kementerian Pertanian dan Irigasi) telah ditunjuk sebagai menteri terkemuka dan sedang dilaksanakan bekerja sama dengan kementerian lain. Saat ini, pembangunan pedesaan sedang dilaksanakan melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB; yang bekerja sesuai dengan Kebijakan Ekonomi Myanmar dan Rencana Pembangunan Berkelanjutan Myanmar (MSDP). Oleh karena itu, pembangunan pedesaan sebagai fokus point dalam pengentasan kemiskinan di Myanmar, maka perlu dilakukan akselerasi

pembangunannya. Untuk itu beberapa hal penting perlu direkomendasikan guna penyempurnaan konsep pemikiran pengentasan kemiskinan di Myanmar sebagai berikut :

- a. Dalam mengatasi masalah pengangguran di masa depan, perlu diupayakan investasi besar-besaran dalam angkatan kerja baik secara lokal maupun internasional, sehingga masalah sosial dan ekonomi dapat dicegah sampai batas tertentu.
- b. Rumah tangga adalah basis/ fondasi untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Maka Langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari jatuh ke garis kemiskinan dan memprioritaskan rencana pembangunan. Harus dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan keluarga terutama para orang tua sebagai pemimpin keluarga yang lebih arif dan bijaksana serta berkualitas. Harus berusaha mendapatkan cukup uang untuk keluarga; Manajemen keluarga, pendapatan, dan merapkan keseimbangan; Menumbuhkan kebiasaan menabung; menghindari perjudian yang kasar, menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi; mengembangkan praktik yang baik seperti penggunaan waktu secara efektif, khususnya pengasuhan dan pendidikan anak sangat penting demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan, prioritas harus diberikan pada moral dan kesejahteraan mental yang baik.
- c. Dibutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengurangi kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia di seluruh negeri termasuk generasi muda merupakan persyaratan mendasar. Oleh karena itu, sistem pendidikan dasar wajib digratiskan dan segera diimplementasikan termasuk pendidikan tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah menengah dan dasar; agar lebih banyak akses ke bahan ajar; meningkatkan kualitas staf pendidikan dan

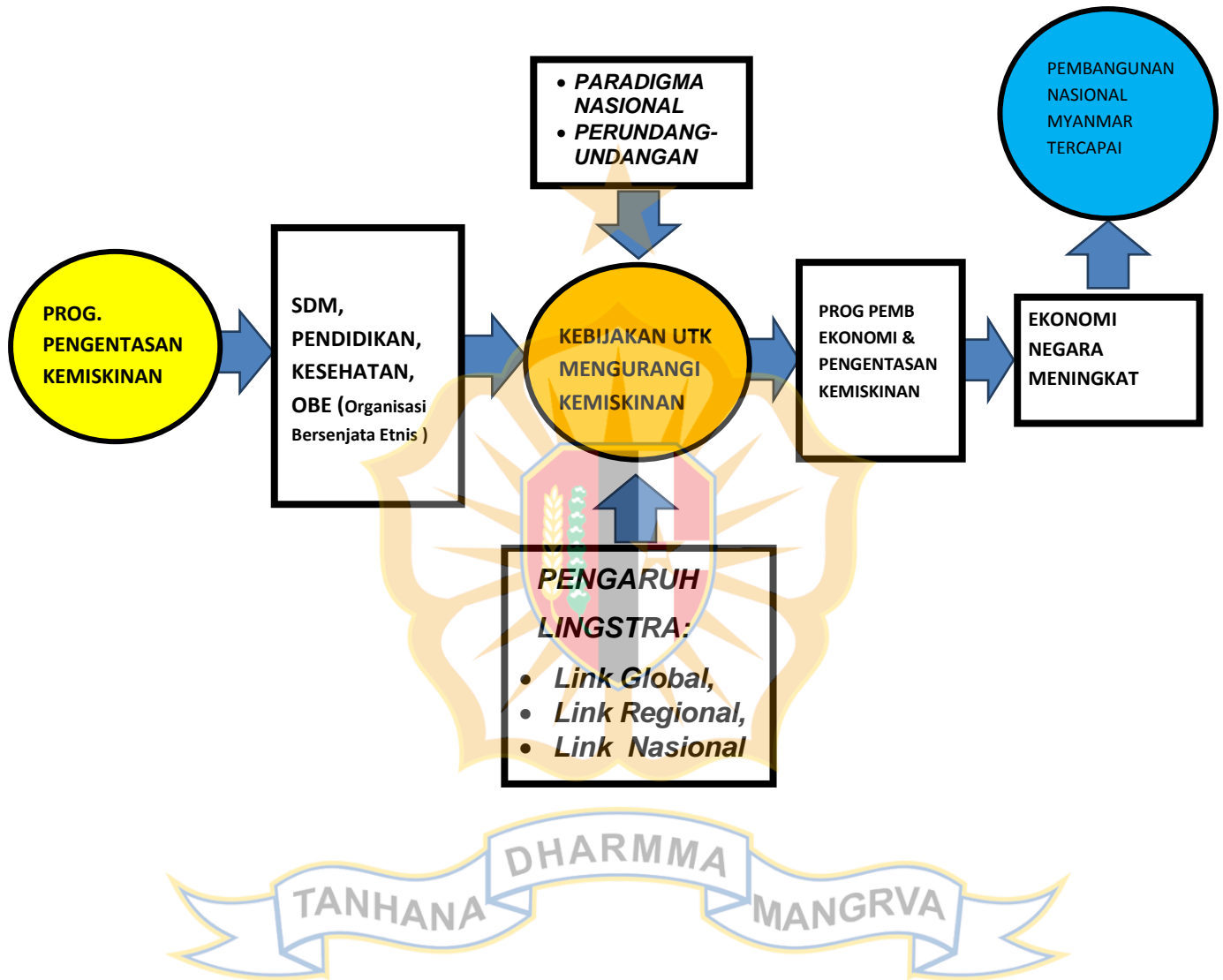
meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat, Sekolah Menengah diharapkan dapat mencapai standar pendidikan internasional.

Ini adalah faktor penting dalam pengembangan ekonomi dan pengembangan lapangan kerja dan peluang kerja di wilayah dan negara bagian. Pemerintah Myanmar perlu menyeimbangkan distribusi pendapatan melalui pengentasan kemiskinan dan melaksanakan strategi pengentasan kemiskinan nasional, serta administrasi publik dan pengembangan industri.



MENGATASI KEMISKINAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
MYANMAR

ALUR PIKIR



DAFTAR TABEL

Table (1) GDP Rate in Respective Economic Sectors (Percentage)

Economic sector	1988	1991	1994	1997	2000	2003	2006	2009	2011
Agriculture	57	59	63	59	58	55	47	45	42
Industry	10	10	9	10	10	11	17	18	21
Services	33	31	28	31	32	34	36	37	37
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Source - World Development Indicators, Various Years.

Table (2) Myanmar's Major Export Rate

Exports	1990-1991		2010-2011	
	US\$(million)	Percentage	US\$(million)	Percentage
Agriculture	152	31.8	1228	13.85
Livestock	1	0.2	13	0.14
Marine products	27	5.6	287	3.23
Fishery products	161	33.7	594	6.70
Mining	12	2.4	42	0.47
Precious gems	14	2.9	2028	22.88
Garment	1	0.3	379	4.2
Other + gas	109	23.1	4290	48.4
Total	477	100.0	8861	100.0

Source - CSO, Statistical Yearbook, 2011.

Table (3) Myanmar's HDI Growth

Year	HDI	HDI - Health	HDI- Education	HDI- Income
2000	0.382	0.661	0.331	0.259
2005	0.435	0.667	0.370	0.344
2006	0.445	0.681	0.397	0.362
2007	0.464	0.685	0.388	0.377
2008	0.472	0.691	0.393	0.391
2009	0.481	0.698	0.399	0.403
2010	0.490	0.705	0.404	0.417

Table (4) Consumption Share by the Lowest 20 Percent from 2005 to 2010

State, region and Union	Urban		Rural		Total	
	2005	2010	2005	2010	2005	2010
Kachin	10.4(3.33)	11.6(1.53)	11.2 (3.58)	12.4 (1.03)	10.9 (2.46)	12.2 (0.88)
Kayah	13.2 (3.63)	14.4 (4.33)	11.3 (0.27)	12.4 (2.18)	12.0 (2.42)	12.8 (0.47)
Kayin	11.2 (6.81)	11.7 (0.61)	12.8 (3.82)	13.1 (0.57)	12.0 (4.59)	12.9 (0.84)
Chin	14.0 (2.32)	13.3 (2.57)	8.8 (4.30)	13.9 (4.06)	9.2 (3.30)	13.6 (2.71)
Sagaing	11.6(2.32)	11.3(2.07)	12.0 (2.60)	13.5(1.46)	11.9 (2.30)	13.1(1.25)
Taninthayi	9.1(6.30)	11.1(7.11)	11.1(2.84)	11.3(3.97)	10.4(3.43)	11.0 (4.32)
Bago	11.2(3.11)	11.7(2.58)	12.7(2.63)	13.0(1.64)	12.5(2.73)	12.8(1.62)
Bago (East)	10.8(3.16)	11.7(1.90)	12.7(3.82)	12.8(2.79)	12.5(4.20)	12.7(2.71)
Bago (West)	11.6(2.07)	11.9(7.73)	12.7(3.32)	13.1(1.81)	12.6(3.25)	13.0(2.06)
Magway	11.0(2.71)	11.5(2.44)	12.0(2.75)	13.3(2.27)	11.8(3.03)	13.0(1.56)
Mandalay	10.7(2.61)	11.1(1.66)	12.5(2.20)	12.5(3.73)	11.7(1.84)	11.7(2.94)
Mon	11.3(1.93)	11.6(0.85)	12.3(6.25)	13.2(1.82)	12.3(5.29)	12.9(1.24)
Rakhine	11.7(1.54)	11.9(0.94)	12.1(1.43)	13.1(2.57)	12.0(1.77)	12.5(4.18)
Yangon	9.5(3.65)	10.9(2.88)	12.0(13.84)	12.6(3.80)	9.9(5.14)	11.0(2.09)
Shan	10.6(3.76)	11.6(4.78)	11.5(1.83)	12.5(2.39)	11.1(2.69)	11.9(3.79)
Shan (South)	10.7(6.17)	11.3(4.80)	10.6(3.66)	12.7(7.06)	11.2(5.12)	12.0(8.97)
Shan (North)	10.2(5.12)	11.5(6.48)	11.4(1.72)	12.3 (4.04)	11.1 (2.57)	11.8 (4.54)
Shan (East)	11.0 (4.04)	12.4(3.40)	11.8(5.28)	14.00(1.24)	11.8(5.47)	13.4(1.43)
Ayeyawady	10.4(3.94)	11.3(2.94)	1.5(1.12)	12.8(1.87)	11.3(1.00)	12.5 (2.06)
Union	10.0(0.48)	11.1(0.02)	11.8(0.92)	12.6(0.92)	11.1(0.90)	12.0(0.81)

Source - IHLCA SurveyI 2004-2005, IHLCA Survey 2009-2010.

Table (5) Consumption Gap between 20 Percent of the Richest People and 20Percent of the Poorest People in December 2009 (In Kyat)

State, region and Union	Urban			Rural			Total		
	2005	2010	% change from 2005 to 2010	2005	2010	% change from 2005 to 2010	2005	2010	% change from 2005 to 2010
Kachin	555,099 (9,665)	584,819 (41,973)	5	468,292 (17,213)	441,710 (18,017)	-6	497,849 (10,190)	482,553 (22,601)	-3
Kayah	485,195 (42,059)	463,023 (4,548)	-5	430,619 (29,947)	502,131 (37,416)	17	458,517 (16,741)	493,365 (12,243)	8
Kayin	702,841 (44,995)	646,662 (29,240)	-8	441,244 (12,000)	424,651 (22,683)	-4	486,849 (13,215)	466,158 (35,113)	-4
Chin	281,814 (13,339)	320,984 (23,341)	14	541,979 (37,437)	222,396 (12,063)	-59	512,453 (147,392)	262,934 (14,348)	-49
Sagaing	580,448 (15,626)	673,345 (49,611)	16	443,418 (11,083)	396,840 (9,204)	-11	465,628 (9,130)	445,894 (20,026)	-4
Taninthayi	799,233 (54,443)	636,130 (22,979)	-20	503,558 (11,921)	489,134 (8,647)	-3	587,840 (21,494)	546,960 (19,167)	-7
Bago	539,675 (27,545)	597,062 (22,861)	11	405,687 (6,872)	431,853 (21,657)	6	424,821 (6,373)	455,783 (12,355)	7
Bago (East)	519,131 (29,092)	567,618 (10,160)	9	418,403 (7,618)	424,145 (17,706)	1	435,113 (7,381)	447,662 (20,380)	3
Bago (West)	555,730 (37,615)	628,083 (31,218)	13	391,960 (5,568)	439,496 (29,174)	12	413,805 (5,292)	462,506 (10,254)	12
Magway	601,958 (9,414)	638,059 (30,382)	6	401,438 (20,163)	388,445 (10,096)	-3	434,415 (18,779)	425,125 (22,929)	-2
Mandalay	677,718 (42,029)	705,688 (9,667)	4	365,934 (7,133)	407,316 (6,650)	11	487,988 (34,836)	533,874 (13,530)	9
Mon	487,259 (38,328)	548,727 (15,399)	13	448,306 (8,310)	402,826 (26,248)	-10	454,581 (11,265)	436,961 (14,828)	-4
Rakhine	472,938 (10,036)	527,943 (13,786)	12	396,187 (15,528)	345,765 (9,201)	-13	422,374 (14,718)	410,776 (18,567)	-3
Yangon	1,098,456 (144,562)	867,863 (81,232)	-21	457,350 (6,152)	417,419 (26,064)	-9	970,235 (138,492)	786,429 (79,107)	-19
Shan	638,398 (25,673)	636,335 (24,989)	0	426,444 (5,325)	390,912 (17,553)	-8	469,640 (26,920)	486,160 (23,182)	-2
Shan (South)	680,135 (16,572)	648,849 (38,848)	-5	434,800 (15,388)	389,562 (21,504)	-10	515,739 (34,852)	510,038 (29,845)	-1
Shan (North)	616,928 (10,397)	641,716 (45,243)	4	416,760 (5,909)	408,057 (10,452)	-2	476,588 (20,502)	483,585 (22,549)	1

State, region and Union	Urban			Rural			Total		
	2005	2010	% change from 2005 to 2010	2005	2010	% change from 2005 to 2010	2005	2010	% change from 2005 to 2010
Shan (East)	537,990 (51,538)	476,415 (7,384)	-11	387,814 (14,236)	275,886 (5,661)	-29	445,266 (18,059)	331,925 (21,491)	-25
Ayeyawady	601,151 (10,874)	643,307 (36,493)	7	482,657 (7,458)	390,809 (15,116)	-19	507,509 (6,493)	444,759 (24,110)	-12
Union	836,180 (100,180)	736,008 (43,363)	-12	445,046 (3,630)	415,457 (5,854)	-7	573,260 (42,472)	525,929 (19,681)	-8

Source - IHLCA Survey, 2004-2005, IHLCA Survey, 2009-2010.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Aung Ko Ko (Dr.) : Pengurangan Kemiskinan dan Kebijakan Ekonomi. Yangon Rumah Percetakan Zaw 2013 Juli
- Kyaw Nyunt U : Memerangi kemiskinan. Yangon Toko buku lengkap; 2007Oktober (untuk pertama kalinya).
- Kyaw Win U : Bebas dari kemiskinan. Yangon Mesin cetak; 2007 Maret (1).
- Myat Thein U : Tinjauan Pembangunan Ekonomi Myanmar Yangon Perpustakaan Rumah Kebijaksanaan 2015 September (untuk pertama kalinya).
- Richard Wilkinson dan Kate Pickett, Spirit Level: Mengapa kesetaraan lebih baik untuk semua orang, Bloomsbury Press, 2009.
- Soe Tin Win (Bank);U: Cara-cara negara berkembang. Yangon Mesin cetak palaung; 2005 September (untuk pertama kalinya).

Jurnal

- Jurnal Manajemen Volume 4, Butir (1) 2017 (Januari, Februari, Maret).
- Jurnal Manajemen Volume (1) No (6) 2014 (April, Mei, Juni).
- "Konsekuensi Kesenjangan Miskin." 2011 Februari.

Fakta dan Surat

- Joe Dickson Jones, Skandinavia dan Andreas Sarah. "Sektor Sektor Publik di Negara Bagian dan Wilayah Myanmar" 2015 September.
- Jets Bensinger dan Lin Maung Maung. "Pemerintah Daerah dan Bisnis Myanmar". 2014 Februari.
- John Dixon Jones; Loran Lans, Scandi dan Milesbury. "Hubungan Keuangan Antar Pemerintah di Myanmar" 2016 Juli

"Kami akan terus melakukannya di 2014. Ringkasan sensus penduduk dan perumahan. " 2017 Desember.

"Kebijakan Ketenagakerjaan Nasional (2015-2025)". Rapat Pleno. 2015. 04 September.

"Laporan Ketimpangan Dunia, Ringkasan Eksekutif 2018". Laboratorium Ketimpangan Dunia.

Proyek Pengembangan Multidisiplin Nasional Kementerian Perencanaan Nasional dan Pengembangan Ekonomi; 2015

Proyek Pengembangan Multidisiplin Nasional Kementerian Perencanaan Nasional dan Pengembangan Ekonomi; 2015

."Prospek Urbanisasi Dunia: Revisi 2018". Persatuan negara-negara.

"Survey Situasi Hidup Rumah Tangga Komprehensif Myanmar (2009-2010)". Studi Situasi Kemiskinan.

"Tren Ketenagakerjaan Sosial Dunia-Tren 2018". Kantor Perburuhan Internasional

Sumber Lain

[www. Worldbank.org/en/topics/poverty/overview](http://www.Worldbank.org/en/topics/poverty/overview).

www.bea.gov.

www.un.org.com/sustainabledevelopment.

www.ourworkdindate.org.

www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sanitation.

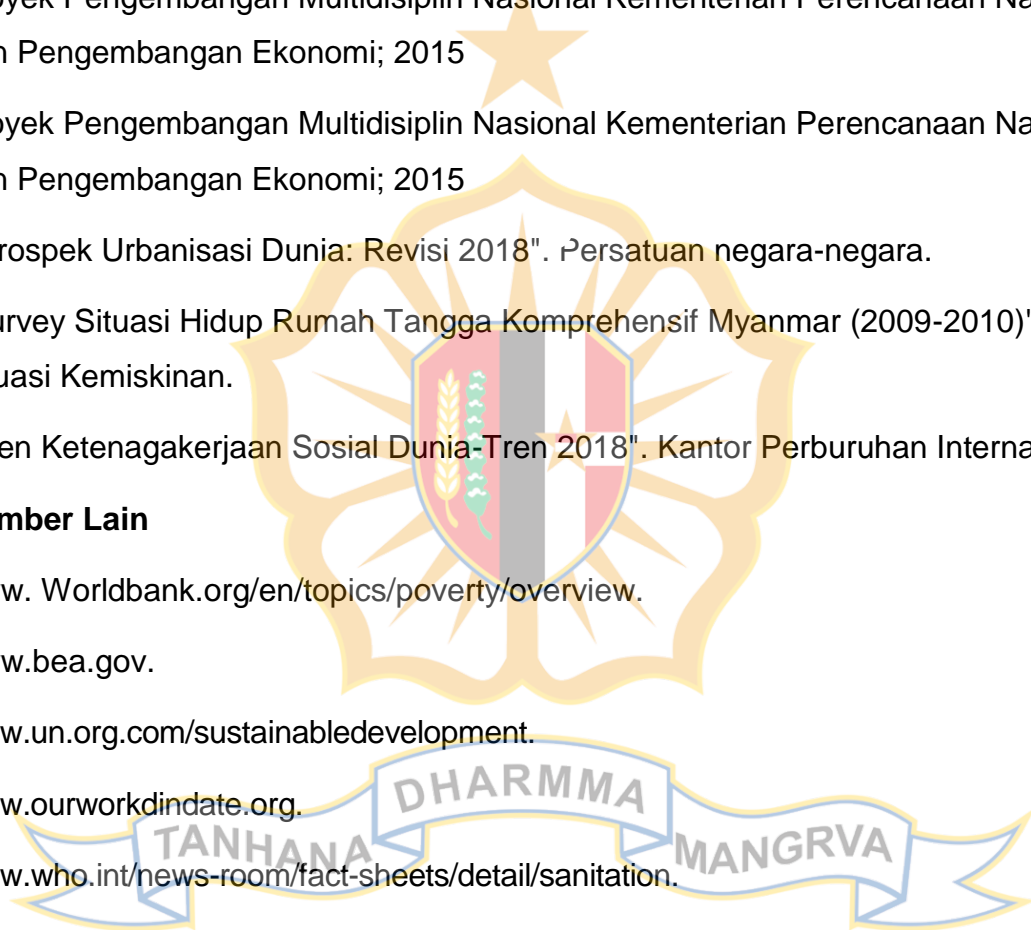
www.worldbank.org/en/news/press-release.

www.unstats.un.org/sdgs/report/2017/goal-13.

www.sustainabledevelopment.un.org/sdgs-14.

www.sustainabledevelopment.un.org/sdgs-15.

www.sustainabledevelopment.un.org/sdgs-16.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : **Than Htike**
2. Pangkat/N.r.p : **Kolonel**
3. Tempat Tanggal Lahir : **Kathar Township, 17 february 1968**
4. Asal Kesatuan/Pengiriman : **Angkatan Darat (Myanmar)**
5. Jenis kelamin : **Laki-Laki**
6. Status Keluarga : **Sudah Menikah**
7. Agama/Suku : **Budha**
8. Alamat : **No. 11 Military Advance Training Depot**
9. No. Telepon : **081387070932**
10. Kemampuan Bahasa : **MYANMAR**
 - a. Asing : **ENGLISH / INDONESIA**
 - b. Daerah : **BURMA**

